



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR



MALL PELAYANAN PUBLIK  
ANJUNGAN IZIN MAS&GENA



Drs. MUJAHIDIN, M.Si  
Ka. Dinas Penanaman Modal & PTSP

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JALAN MANUNGAL NOMOR 11 PEKKABATA POLEWALI

# LAPORAN

*Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah*

# (LAKIP)

## TAHUN 2021



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar merupakan Perencanaan Kinerja Tahun 2021 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar. Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 melaporkan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan merupakan gambaran hasil dari Rencana Kinerja tahun 2020 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024, Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2020, DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar

LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar mempunyai 4 Program, 10 Kegiatan dan terdiri dari 29 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tujuan indikator penetapan kinerja.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Sasaran menunjukkan bahwa tingkat pencapaian tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan sebagian besar telah terealisasi, ini menandakan bahwa pelaksanaan kinerja Tahun 2021 pencapaiannya sangat

baik.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 ini disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar secara menyeluruh, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 31 Tahun 2017 tentang tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.;
2. LAKIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategi terkait 4 (Empat) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan;
3. Dari sasaran yang ditetapkan pada tahun 2021 ini, telah diwujudkan dalam rincian mengenai capaian kinerja sasaran yang secara lengkap dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar;
4. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar terlihat dari pencapaian sasaran strategi yang ditetapkan dan secara keseluruhan dapat diwujudkan dengan baik;

Kami menyadari bahwa informasi yang kami sajikan dalam LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak serta tidak luput dari kekurangan. Untuk itu LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar siap menerima saran, kritikan maupun koreksi demi untuk penyempurnaan LAKIP ini pada masa-masa yang akan datang.

Polewali, 18 Februari 2022

Dinas Penanaman Modal  
Kepala Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Polewali Mandar,



**Drs. MUJAHIDIN, M. Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660606 199803 1014



# KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dapat kami selesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan upaya SKPD untuk menjelaskan dan menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun 2021 sebagai komitmen untuk dapat meningkatkan kinerja instansi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta capaian sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi SKPD yaitu **Meningkatkan Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**, sesuai yang telah diterapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2024

Hasil pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak lepas dari kerjasama dan kerja keras seluruh pejabat dan staf dalam merealisasikan seluruh program dan kegiatan, juga peran masyarakat sebagai pengguna fasilitas pelayanan publik di DPMPSTP serta aparat pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam perumusan kebijakan maupun implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait telah memberikan dukungan dan bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 dapat diselesaikan sebagai wujud dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021. Disamping itu laporan ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu program / kegiatan dengan menggunakan indikator yang terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini dimaksud untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien serta perkiraan manfaat dan dampak yang ditimbulkan.

Disadari walaupun didalam penyusunan LAKIP ini telah diusahakan secara maksimal namun masih banyak kekurangan atau kelemahannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan.



Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 disampaikan, atas perhatian dan masukan dari semua pihak, diucapkan terima kasih. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 bermanfaat bagi kita semua dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

***Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.***

# DAFTAR ISI

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>                         | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                             | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                 | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                               | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                              | <b>x</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                          | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang .....                               | 1          |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan .....               | 3          |
| 1.3. Maksud dan Tujuan Pelaporan .....                  | 4          |
| 1.4. Kondisi Organisasi .....                           | 4          |
| 1.5. Sistematika Penulisan .....                        | 13         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>                 | <b>15</b>  |
| 2.1. Rencana Strategis .....                            | 15         |
| 2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2021 .....                 | 21         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN .....</b> | <b>24</b>  |
| 3.1. Akuntabilitas Kinerja.....                         | 24         |
| 3.2. Akuntabilitas Keuangan .....                       | 117        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                             | <b>125</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....                                   | 125        |
| 4.2. Saran-Saran .....                                  | 125        |
| <b>LAMPIRAN :</b>                                       |            |
| I. Perjanjian Kinerja Tahun 2021                        |            |
| II. Pengukuran Kinerja Tahun 2021                       |            |
| III. Realisasi Anggaran Tahun 2021                      |            |

## DAFTAR TABEL

|                 |                                                                                                                                                               |    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1</b>  | : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon / Pejabat                                                                                                            | 6  |
| <b>Tabel 2</b>  | : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Golongan                                                                                                                    | 7  |
| <b>Tabel 3</b>  | : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan                                                                                                          | 7  |
| <b>Tabel 4</b>  | : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin                                                                                                               | 7  |
| <b>Tabel 5</b>  | : Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang                                                                                                                      | 8  |
| <b>Tabel 6</b>  | : Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 - 2024                                                       | 20 |
| <b>Tabel 7</b>  | : Penetapan Kinerja Tahun 2021                                                                                                                                | 23 |
| <b>Tabel 8</b>  | : Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021                                                                                       | 25 |
| <b>Tabel 9</b>  | : Data Laporan Nilai Realisasi Investasi Daerah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Nama Perusahaan Tahun 2021       | 28 |
| <b>Tabel 10</b> | : Data Laporan Nilai Realisasi Investasi Daerah pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Nama Perusahaan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 | 29 |
| <b>Tabel 11</b> | : Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN Tahun 2021                                                 | 30 |
| <b>Tabel 12</b> | : Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Penunjang Indikator Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN                                                        | 31 |
| <b>Tabel 13</b> | : SPM Nasional pada Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN                                                                                                     | 38 |
| <b>Tabel 14</b> | : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan SPM Nasional                                                                                               | 38 |
| <b>Tabel 15</b> | : Analisis Efisiensi Sumberdaya yang dilakukan pada Indikator Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN                                                           | 41 |
| <b>Tabel 16</b> | : Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN Tahun 2021                          | 42 |
| <b>Tabel 17</b> | : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tentang Persepsi / Pendapat Responden tentang Pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021                  | 60 |
| <b>Tabel 18</b> | : Data hasil Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Periode Tahun 2021                                                                         | 61 |
| <b>Tabel 19</b> | : Data Laporan Hasil Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Tahun 2017 s/d Tahun 2021             | 63 |
| <b>Tabel 20</b> | : Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021                                 | 64 |



|                 |                                                                                                                                                                                                   |       |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>Tabel 21</b> | : Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Penunjang Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021                                                                 | ..... | <b>64</b>  |
| <b>Tabel 22</b> | : SPM Nasional pada Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                                                                                                                         | ..... | <b>68</b>  |
| <b>Tabel 23</b> | : Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021 dengan SPM Nasional                                                                             | ..... | <b>69</b>  |
| <b>Tabel 24</b> | : Analisis Efisiensi Sumberdaya yang dilakukan pada Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                                                                               | ..... | <b>70</b>  |
| <b>Tabel 25</b> | : Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021                                              | ..... | <b>71</b>  |
| <b>Tabel 26</b> | : Jumlah Izin dan Non Izin yang di terbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 s/d Tahun 2021                                           | ..... | <b>72</b>  |
| <b>Tabel 27</b> | : Hasil Survei Kepuasan Pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021                                                                                                               | ..... | <b>92</b>  |
| <b>Tabel 28</b> | : Data Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Dari Tahun 2019 s/d Tahun 2021              | ..... | <b>94</b>  |
| <b>Tabel 29</b> | : Analisis Efisiensi Sumberdaya yang dilakukan pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder                                                                                              | ..... | <b>98</b>  |
| <b>Tabel 30</b> | : Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder Tahun 2021                                                             | ..... | <b>100</b> |
| <b>Tabel 31</b> | : Data Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021                                                 | ..... | <b>102</b> |
| <b>Tabel 32</b> | : Data Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Dari Tahun 2019 s/d Tahun 2021                             | ..... | <b>103</b> |
| <b>Tabel 33</b> | : Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Penunjang Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 | ..... | <b>105</b> |
| <b>Tabel 34</b> | : Analisis Efisiensi Sumberdaya yang dilakukan pada Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                     | ..... | <b>107</b> |
| <b>Tabel 35</b> | : Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat daerah Tahun 2021                                                                    | ..... | <b>108</b> |

|                 |                                                                                                                                                                                              |       |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>Tabel 36</b> | : Data Indikator Opini Pengelolaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Dari Tahun 2021                                            | ..... | <b>111</b> |
| <b>Tabel 37</b> | : Data Indikator Opini Pengelolaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Dari Tahun 2019 s/d Tahun 2021                             | ..... | <b>112</b> |
| <b>Tabel 38</b> | : Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Penunjang Indikator Opini Pengelolaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 | ..... | <b>113</b> |
| <b>Tabel 39</b> | : Analisis Efisiensi Sumberdaya yang dilakukan pada Indikator Opini Pengelolaan Keuangan                                                                                                     | ..... | <b>115</b> |
| <b>Tabel 40</b> | : Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Opini Pengelolaan Keuangan Tahun 2021                                                                    | ..... | <b>116</b> |
| <b>Tabel 41</b> | : Realisasi Anggaran Tahun 2021                                                                                                                                                              | ..... | <b>119</b> |
| <b>Tabel 42</b> | : Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 s/d Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar                                            | ..... | <b>124</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                  |                                                                                                                                                                                |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 1</b>  | : Diagram batang perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2021                                                                                                           | 26 |
| <b>Gambar 2</b>  | : Diagram Batang Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN Tahun 2021                                                   | 31 |
| <b>Gambar 3</b>  | : Keikutsertaan DPMPTSP Kabupaten :Polewali Mandar pada Acara Kegiatan Rapat Kerja Peningkatan Program dan Kegiatan Penanaman Modal Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 | 32 |
| <b>Gambar 4</b>  | : Partisipasi DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Mengikuti Rakornas Penanaman Modal di Jakarta dan Provinsi Sulawesi Barat                                                      | 33 |
| <b>Gambar 5</b>  | : Buku Profil Investasi Kabupaten Polewali Mandar dan Brosur Profil Investasi                                                                                                  | 34 |
| <b>Gambar 6</b>  | : Kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Para Pelaku Usaha / Perusahaan                                                   | 33 |
| <b>Gambar 7</b>  | : Diagram Batang Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021                        | 63 |
| <b>Gambar 8</b>  | : Diagram Batang Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021                                   | 64 |
| <b>Gambar 9</b>  | : Kegiatan Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar                                                   | 66 |
| <b>Gambar 10</b> | : Suasana Pelayanan Perizinan                                                                                                                                                  | 72 |
| <b>Gambar 11</b> | : Loker Pelayanan Perizinan                                                                                                                                                    | 82 |
| <b>Gambar 12</b> | : Foto Kegiatan Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021                                             | 88 |
| <b>Gambar 13</b> | : Kegiatan Proses Penerbitan Izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar                                                          | 88 |
| <b>Gambar 14</b> | : Kegiatan Tim Teknis Perizinan dalam Peninjauan dan Pengawasan perizinan dan Non Perizinan                                                                                    | 89 |
| <b>Gambar 15</b> | : Diagram Batang Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder pada Dinas PMPTSP Tahun 2021                                   | 93 |



|                  |                                                                                                                                          |       |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>Gambar 16</b> | : Diagram Batang Perbandingan antara Bobot dan Nilai pada Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas PMPTSP Tahun 2021 | ..... | <b>103</b> |
| <b>Gambar 17</b> | : Diagram Batang Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Indikator Kinerja Opini Pengelolaan Keuangan pada Dinas PMPTSP Tahun 2021 | ..... | <b>112</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penilaian dan Pelaporan kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan efisien. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat termasuk pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna sesuai tuntunan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Yang dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar. Langkah pembentukan organisasi tersebut, harus diikuti pula dengan perspektif manajemen yang professional. Dalam Hal ini, manajemen birokrasi harus diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga bersinergi dengan tujuan dibangunnya organisasi. Upaya serius dalam menciptakan perspektif manajemen birokrasi yang mampu menjawab kebutuhan lingkungan internal dan eksternal harus dilakukan, baik pada tahapan planning, organizing, actuating maupun controlling.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sesuai dengan siklusnya setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020 instansi wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengkalsifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi yang dituangkan melalui Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan Evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai



hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dalam menyusun dan menyampaikan kepada Bupati berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat LAKIP. Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Adapun dasar hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.
6. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar.



### 1.3. Maksud dan Tujuan LAKIP Tahun 2020

1.4.



Untuk memastikan bahwa Visi, Misi dan Tujuan Strategi dapat dipenuhi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar yang selaras tiap tahunnya ditetapkan dengan program dan kegiatan. Maka maksud dan tujuan penyusunan dan pentampaian LAKIP Dinas Penanaman

Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk keperluan eksternal organisasi menjadikan LAKIP Tahun 2021 sebagai sarana pertanggung jawaban yang memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Untuk keperluan internal organisasi menjadikan LAKIP Tahun 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas untuk upaya perbaikan berkesinambung bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### 1.4. Kondisi Organisasi

#### 1.4.1. Kondisi Kelembagaan

##### a. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. **Kepala;**
2. **Sekretariat :**
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. **Bidang Penanaman Modal :**
  - a. Seksi Perencanaan Pengendalian, Sistem Informasi dan Pengawasan Penanaman Modal
  - b. Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
4. **Bidang Pelayanan Informasi Pengaduan dan Pendaftaran**
  - a. Seksi Pendaftaran Verifikasi dan Pelaporan Perizinan
  - b. Seksi layanan Informasi, Pengaduan, Konsultasi, Pengawasan Dan Penyuluhan
5. **Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor A**
  - a. Seksi Peninjauan Sektor A
  - b. Seksi Penetapan Sektor A
6. **Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor B**
  - a. Seksi Peninjauan Sektor B
  - b. Seksi Penetapan Sektor B
7. **Kelompok Jabatan Fungsional.**





Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2020 pada Bab II Bagian Pertama dari penjabaran Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas dijelaskan bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud diatas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dimana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.4.2. Kondisi Kepegawaian



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar didukung oleh aparat dengan susunan sebagai berikut :

#### a. Berdasarkan Eselon / Jabatan

**Tabel 1 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon/Pejabat**

| No. | Eselon | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|-----|--------|---------------|-----------|--------|
|     |        | Laki-Laki     | Perempuan |        |
| 1   | II     | 1             | -         | 1      |
| 2   | III    | 5             | -         | 5      |
| 3   | IV     | 5             | 6         | 11     |
| 4   | Staf   | 0             | 8         | 8      |

|               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Jumlah</b> | <b>11</b> | <b>14</b> | <b>25</b> |
|---------------|-----------|-----------|-----------|

Keadaan Per 31 Desember 2021

**b. Berdasarkan Golongan**

**Tabel 2 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Golongan**

| No.           | Golongan | Jenis Kelamin |           | Jumlah    |
|---------------|----------|---------------|-----------|-----------|
|               |          | Laki-Laki     | Perempuan |           |
| 1             | I        | -             | -         | -         |
| 2             | II       | -             | 1         | 1         |
| 3             | III      | 5             | 13        | 18        |
| 4             | IV       | 6             | -         | 6         |
| <b>Jumlah</b> |          | <b>11</b>     | <b>14</b> | <b>25</b> |

Keadaan Per 31 Desember 2021

**c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

**Tabel 3 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No.           | Golongan        | Jenis Kelamin |           | Jumlah    |
|---------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
|               |                 | Laki-Laki     | Perempuan |           |
| 1             | SD              | -             | -         | -         |
| 2             | SMP/Sederajat   | -             | -         | -         |
| 3             | SLTA/Sederajat  | -             | 1         | 1         |
| 4             | Sarjana Muda/D3 | -             | -         | -         |
| 5             | Strata 1 (S1)   | 3             | 12        | 15        |
| 6             | Strata 2 (S2)   | 8             | 1         | 9         |
| <b>Jumlah</b> |                 | <b>11</b>     | <b>14</b> | <b>25</b> |

Keadaan Per 31 Desember 2021

**d. Berdasarkan Jenis Kelamin**

**Tabel 4 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin**

| No.           | Jenis Kelamin | Jumlah    |
|---------------|---------------|-----------|
| 1             | Laki-Laki     | 11        |
| 2             | Perempuan     | 14        |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>25</b> |

Keadaan Per 31 Desember 2021

**1.4.3. Kondisi Sarana an Prasarana Penunjang.**

Dalam pencapaian target kinerja selain didukung dengan Sumber Daya Manusia yang memadai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar juga didukung dengan sarana dan

prasarana yang cukup memadai sehingga sangat menentukan efektifitas kinerja organisasi. Adapun ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5 : Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang**

| No | Sarana                   | Jumlah | Keadaan |             |       |
|----|--------------------------|--------|---------|-------------|-------|
|    |                          |        | Baik    | Kurang Baik | Rusak |
| 1  | 2                        | 3      | 4       | 5           |       |
|    | <b><u>TAHUN 2016</u></b> |        |         |             |       |
| 1  | Papan Informasi          | 2      | 2       | -           | -     |
| 2  | Server                   | 1      | 1       | -           | -     |
| 3  | Rak Koran                | 1      | 1       | -           | -     |
| 4  | Wireles Router           | 1      | 1       | -           | -     |
| 5  | Siaber                   | 1      | 1       | -           | -     |
| 6  | AC                       | 3      | 3       | -           | -     |
| 7  | Jam Dinding              | 2      | 2       | -           | -     |
| 8  | Komputer PC              | 5      | 5       | -           | -     |
| 9  | Kursi Kayu               | 7      | 7       | -           | -     |
| 10 | Kursi Lipat              | 5      | 5       | -           | -     |
| 11 | Kursi Putar              | 2      | 2       | -           | -     |
| 12 | Lemari Kayu              | 3      | 3       | -           | -     |
| 13 | Meja ½ Biro              | 9      | 9       | -           | -     |
| 14 | Meja Komputer            | 6      | 5       | 1           | -     |
| 15 | Printer                  | 5      | 5       | -           | -     |
| 16 | Sapu                     | 2      | 2       | -           | -     |
| 17 | Sendok Sampah            | 2      | 2       | -           | -     |
| 18 | Tempat Sampah            | 3      | 3       | -           | -     |
| 19 | UPS                      | 1      | -       | -           | 1     |
| 20 | Gordeng Panjang          | 5      | 5       | -           | -     |
| 21 | Gordeng Pendek           | 8      | 8       | -           | -     |
| 22 | TV                       | 1      | 1       | -           | -     |
| 23 | Meja Pelayanan           | 6      | 6       | -           | -     |
| 24 | Papan Struktur           | 1      | 1       | -           | -     |
| 25 | Papan Visi dan Misi      | 1      | 1       | -           | -     |
| 26 | Kursi Tunggu             | 3      | 3       | -           | -     |
| 27 | Meja Gantung             | 1      | 1       | -           | -     |
| 28 | Sekat                    | 2      | 2       | -           | -     |
| 29 | Laptop                   | 1      | 1       | -           | -     |

|    |                                   |    |    |   |   |
|----|-----------------------------------|----|----|---|---|
| 30 | Sepeda Motor                      | 1  | 1  | - | - |
| 31 | Dispenser                         | 1  | 1  | - | - |
| 32 | Filling Cabinet                   | 1  | 1  | - | - |
| 33 | Gordeng Biasa                     | 2  | 2  | - | - |
| 34 | Kursi Panjang                     | 1  | 1  | - | - |
| 35 | Kursi Plastik                     | 4  | 4  | - | - |
| 36 | Kursi Putar Besar                 | 4  | 4  | - | - |
| 37 | Meja Biro                         | 3  | 1  | 2 | - |
| 38 | Meja Panjang                      | 1  | 1  | - | - |
| 39 | Mesin Ketik                       | 2  | -  | - | 2 |
| 40 | Monitor                           | 2  | 2  | - | - |
| 41 | Sapu Ijuk                         | 1  | 1  | - | - |
|    | <b><u>TAHUN 2017</u></b>          |    |    |   |   |
| 1  | AC 1 PK                           | 4  | 4  | - | - |
| 2  | Lemari Arsip 2 Pintu              | 5  | 5  | - | - |
| 3  | Komputer                          | 4  | 4  | - | - |
| 4  | Laptop                            | 3  | 3  | - | - |
| 5  | Printer                           | 8  | 8  | - | - |
| 6  | UPS/Stabilizer                    | 6  | 6  | - | - |
| 7  | Meja Kerja 1 biro                 | 5  | 5  | - | - |
| 8  | Meja Kerja Staf                   | 5  | 6  | - | - |
| 9  | Meja Rapat                        | 1  | 1  | - | - |
| 10 | Kursi Kerja Pejabat<br>Eselon II  | 1  | 1  | - | - |
| 11 | Kursi Kerja Pejabat<br>Eselon III | 4  | 4  | - | - |
| 12 | Kursi Kerja Pejabat<br>Eselon IV  | 10 | 10 | - | - |
| 13 | Kursi Kerja Staf                  | 5  | 5  | - | - |
| 14 | Kursi Tunggu                      | 6  | 6  | - | - |
| 15 | Kursi Tamu/Ruang<br>Tunggu        | 1  | 1  | - | - |
| 16 | Kursi Tamu Eselon III             | 1  | 1  | - | - |
| 17 | Kursi Rapat                       | 20 | 20 | - | - |
| 18 | Sofa Ruang Pejabat<br>Eselon II   | 1  | 1  | - | - |
| 19 | Dispenser                         | 4  | 4  | - | - |
| 20 | Kulkas                            | 1  | 1  | - | - |
| 21 | TV                                | 6  | 6  | - | - |
| 22 | WirelesToa                        | 1  | 1  | - | - |

|   |                                  |    |    |   |   |
|---|----------------------------------|----|----|---|---|
| 1 | <b><u>TAHUN 2018</u></b>         | 4  | 4  | - | - |
| 2 | Motor                            | 1  | 1  | - | - |
| 3 | Laptop<br>Printer                | 4  | 4  | - | - |
| 1 | <b><u>TAHUN 2019</u></b>         | 2  | 2  | - | - |
| 2 | Laptop                           | 1  | 1  | - | - |
| 3 | LCD Proyektor<br>Layar Proyektor | 1  | 1  | - | - |
|   | <b><u>TAHUN 2020</u></b>         |    |    |   |   |
| 1 | Laptop                           | 3  | 3  | - | - |
| 2 | Printer                          | 3  | 3  | - | - |
| 3 | Filing Kabinet                   | 2  | 2  | - | - |
| 4 | Kursi Rapat                      | 24 | 24 | - | - |
| 5 | Meja Rapat                       | 8  | 8  | - | - |
|   | <b><u>TAHUN 2021</u></b>         |    |    |   |   |
| 1 | AC 2 PK                          | 1  | 1  | - | - |
| 2 | Meja Biro                        | 4  | 4  | - | - |
| 3 | Meja Kerja'                      | 4  | 4  | - | - |
| 4 | Lemari Arsip                     | 1  | 1  | - | - |
| 5 | Laptop Asus                      | 1  | 1  | - | - |
| 6 | Komputer PC All In One           | 3  | 3  | - | - |
| 7 | Printer Epson                    | 4  | 4  | - | - |
| 8 | Tempat Parkir<br>Kendaraan       | 1  | 1  | - | - |
| 9 | Drone                            | 1  | 1  | - | - |

Keadaan Per 31 Desember 2021

## Isu Strategis Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Penanaman modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar dengan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten



Polewali Mandar. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas pokok membantu Bupati memelihara dan melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas perbantuan di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Terpadu sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan PTSP.
- b. Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Penanaman Modal dan PTSP
- c. Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian di Bidang Penanaman Modal dan PTSP
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan sesuai dengan Bidang tugasnya.

Fungsi perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan melalui kegiatan penanaman modal. Fungsi pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan dan pengaduan. Fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan melalui pengawasan, pengelolaan data dan informasi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berhubungan hal yang menjadi isu strategis di dalam meningkatkan fungsi dan peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar antara lain :

- a. Kualitas SDM aparatur yang professional
- b. Dukungan sarana dan prasarana
- c. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai aspek strategis penunjang tugas pelayanan
- d. Dukungan SKPD Terkait dalam untuk sinergitas dan sinkronisasi

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja serta kajian terhadap pencapaian kinerja rencana strategis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman

Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar. Menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar, yaitu :

1. Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Polewali Mandar
2. Anggaran penyelenggaraan pameran promosi investor yang masih terbatas.
3. Belum terbentuknya regulasi tentang Pelaksanaan Pelayanan Penanaman modal dan Penyederhanaan Prosedur perizinan dan non perizinan yang akan menunjang dalam pengembangan investor di Kabupaten Polewali Mandar
5. Penyelesaian rata-rata lama waktu izin yang terkadang tidak sesuai dengan waktu yang sudah diatur oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) disebabkan rekomendasi izin yang lama dari instansi terkait.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar.dirumuskan sebagai berikut :

**1. Urusan Penanaman Modal :**

1. Rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya didaerah
2. Minimnya informasi tentang iklim investasi daerah
3. Masih kurangnya promosi investasi daerah kepada pemilik modal
4. Belum maksimalnya norma, standar dan prosedur perizinan investasi daerah
5. Terbatasnya sarana fasilitas pendukung pengembangan informasi penanaman modal.

**2. Urusan Perizinan :**

- a. Masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan Personil Pelayanan Perizinan
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana fasilitas penunjang pelayanan perizinan
- c. Masih perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD Teknis terkait prosedur pelayanan perizinan
- d. Belum optimalnya pelayanan perizinan penanaman modal berbasis online
- e. Masih adanya regulasi yang perlu di evaluasi dan disempurnakan terutama yang berhubungan dengan standar operation prosedur (SOP).

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam uraian singkat masing-masing bab sebagai berikut :

#### **Bab I : PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang yang menjelaskan secara singkat tentang pentingnya akuntabilitas, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan. Dan Memuat Kedudukan tugas, pokok dan fungsi yang menjelaskan secara umum tentang organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi

#### **Bab II : PERENCANAAN KINERJA**

Memuat Rencana Strategis yang menjelaskan secara singkat Renstra meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama/sasaran dan memuat Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang menjelaskan Target Kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021

#### **Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**

Memuat Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tujuan per sasaran dan perindikator sasaran dan dijelaskan data kinerja berupa tabel atau grafik dan penjelasan memadai lainnya. Dan Memuat pula Akuntabilitas Keuangan yang menguraikan informasi yang cukup terkait akuntabilitas keuangan satuan kerja.

**Bab IV : PENUTUP**

Memuat Uraian umum atas capaian kinerja serta langkah-langkah dimasa datang organisasi

**LAMPIRAN**

Memuat Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Anggaran Tahun 2021.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar berisi rumusan kebijakan, strategi dan program-program prioritas dalam jangka menengah lima tahun yang diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kondisi objektif dan perubahan dinamika lingkungan strategis.

Dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggung jawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renstra mengandung Visi, Misi, tujuan, dan sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.





**a. Visi**

“ Terwujudnya Iklim Investasi yang sehat dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang sehat dan akuntabel”

Makna visi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi
- Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas
- Terwujudnya Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang optimal.

Dengan pernyataan visi di atas diperlukan langkah dan strategi antisipatif dan inovatif untuk mewujudkannya. Visi tersebut juga menunjukkan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar. Penetapan visi tersebut juga merupakan motivasi utama bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama-sama pihak berkepentingan lainnya untuk menentukan kearah mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan dibawa dan sekaligus merupakan konsensus bersama dalam upaya merefleksikan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat keinginan yang kuat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka disiplin aparaturnya mewujudkan pelayanan prima menuju pemerintahan yang baik. Dengan penetapan Visi tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu **“POLEWALI MANDAR MAJU RAKYAT SEJAHTERA”**. Didukung oleh aparaturnya yang berwawasan luas, bermoral, penuh dedikasi dan bebas KKN.

Visi dan misi Pemerintah Polewali Mandar tersebut dapat dilihat dari peningkatan iklim investasi di daerah dan pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat yang berkaitan erat dengan Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

## **b. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskanlah misi sebagai berikut :

### **1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi serta Sarana dan Prasarana Penanaman Modal**

Makna Misi yang dimaksud adalah ::

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi investor untuk menguatkan daya saing perekonomian Daerah.
- b. Mempercepat peningkatan Penanaman Modal.
- c. Menyusun dan mengembangkan kebijakan/strategi promosi Penanaman Modal di Daerah.
- d. Mendorong dan meningkatkan interaksi sarana stakeholder baik kalangan dunia usaha perbangkan termasuk pemerintah sehingga dapat mengembangkan kemitraan.

### **2. Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, tepat akuntabel**

Makna Misi yang dimaksud adalah :

“ Terciptanya Pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang sederhana dan adanya kepastian hukum serta tertib administrasi didalam pengelolaannya. “

### **3. Peningkatan Kualitas Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan**

Makna Misi yang dimaksud adalah ::

“ Bahwa Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian secara terus menerus akan mampu memberikan iklim investasi yang lebih baik.”

## **c. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari misi untuk mewujudkan visi Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar selama kurun waktu 2014-2019. Tujuan dan Sasaran pada masing-masing Misi diuraikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi serta Sarana dan Prasarana Penanaman Modal

Tujuan :

Terwujudnya Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi

Sasaran:

Meningkatkan Promosi dan Iklim Investasi

- 2) Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas serta tertib Administrasi yang cepat, tepat dan akuntabel

Tujuan :

Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang berkualitas

Sasaran:

Meningkatkan Kualitas Layanan Perizinan

- 3) Meningkatnya Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian

Tujuan :

Terwujudnya perlindungan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan yang optimal

Sasaran :

Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan izin dan non izin yang diterbitkan.

#### **d. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

Dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2014-2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menetapkan sasaran strategis beserta Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis:

- a. Meningkatkan Investasi Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

2. Indikator Kinerja

- a. Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah , terdiri dari indikator:
  - Nilai realisasi investasi daerah PMDN
  - Nilai realisasi investasi daerah PMA

b. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari 1 indikator:

- Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan



Adapun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar yang memuat tujuan dan sasaran serta pencapaian target dalam lima tahun kedepan Tahun 2019 s/d 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel.6**

**Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019-2024**

| No. | Tujuan                                                      | Sasaran                                                   | Indikator Tujuan/Sasaran                                    | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-    |                 |                |                 |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                             |                                                           |                                                             | 2019                                            | 2020            | 2021           | 2022            | 2023            | 2024            |
| 1   | Meningkatnya Daya Saing Ekonomi yang merata dan berkualitas | Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN                     | Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN                       | 170.650.000.000                                 | 192.985.000.000 | 98.650.000.000 | 118.450.000.000 | 140.750.000.000 | 165.150.000.000 |
|     |                                                             |                                                           |                                                             | Meningkatnya Investasi Daerah                   | 2.000.000.000   | -              | -               | -               | -               |
|     |                                                             |                                                           |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder          | Baik            | Baik           | Baik            | Baik            | Baik            |
| 2   | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan              | Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan | Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan       | Baik                                            | Baik            | Baik           | Baik            | Baik            | Baik            |
|     |                                                             |                                                           |                                                             | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran     | B               | BB             | A               | A               | A               |
|     |                                                             |                                                           |                                                             | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | WTP             | WTP            | WTP             | WTP             | WTP             |
|     |                                                             |                                                           | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | WTP                                             | WTP             | WTP            | WTP             | WTP             | WTP             |



## 2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2021



Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menyusun suatu Rencana Kinerja (performanceplan) setiap tahunnya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan perbandingan dari proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Selain dari RKT, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar juga membuat Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Dengan demikian, Penetapan Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penetapan Kinerja berubah menjadi Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja atau yang berganti menjadi Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu:

a. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan harus berorientasi hasil.

b. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

c. Target

Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu.

**Penyusunan Perjanjian Kinerja** merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Baca juga : Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

### Tujuan Penyusunan

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitori
5. ng, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7 : Penetapan Kinerja Tahun 2021**

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                           | INDIKATOR KINERJA SASARAN |                                                       | TARGET    |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | Meningkatnya Investasi Daerah                               | 1                         | Nilai realisasi investasi daerah PMDN                 | 98 Milyar |
| 2   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 1                         | Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan | Baik      |
| 3   | Meningkatnya Kualitas Manajemen Organisasi Perangkat Daerah | 1                         | Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder              | Baik      |
|     |                                                             | 2                         | Predikat SAKIP Perangkat daerah                       | BB        |
|     |                                                             | 3                         | Opini Pengelolaan Keuangan                            | WTP       |



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis

suatu organisasi. Pengukuran Kinerja

adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penilaian, melainkan sebagai alat komunikasi dari alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah

Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja serta tindakan perbaikan yang diperlukan ke depan. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak

eksternal dalam pelaksanaan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

### 3.1. Akuntabilitas Kinerja

#### 3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.

Perbandingan Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi untuk Tahun 2021 indikator ini, dapat dilihat dari tabel dan diagram batang di bawah ini:

Tabel 8 : Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021.

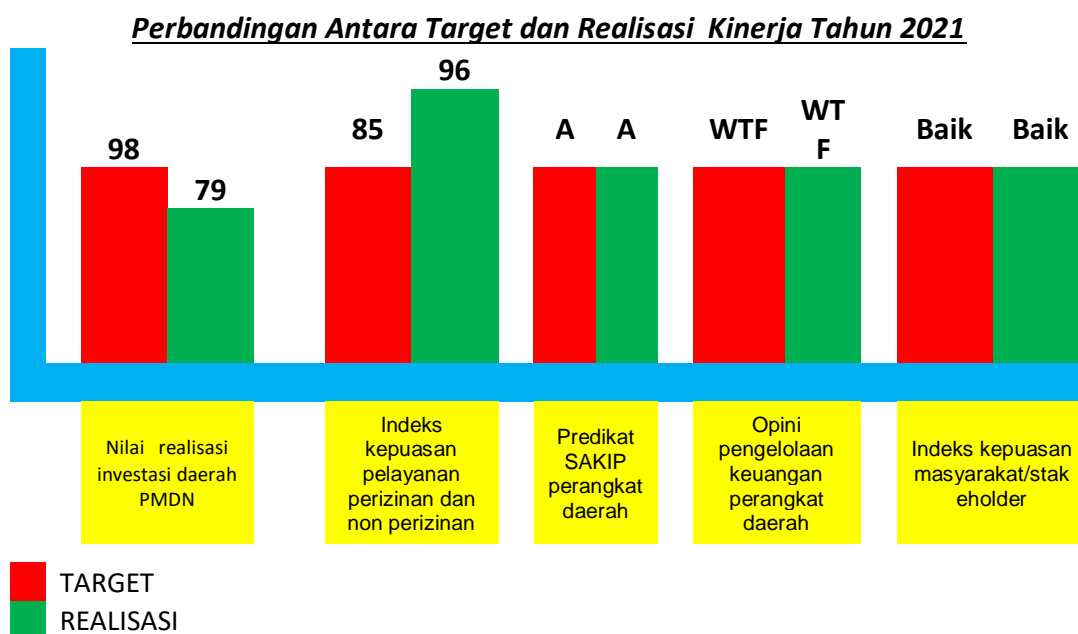
| NO. | SASARAN STRATEGIS                                           | INDIKATOR KINERJA SASARAN                               | TARGET    | CAPAIAN TARGET KINERJA | %   |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----|
| 1   | Meningkatnya Investasi Daerah                               | 1 Nilai realisasi investasi daerah PMDN                 | 98 Milyar | 79 Milyar              | 81  |
| 2   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 1 Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan | 86 Persen | 96 Persen              | 112 |
| 3   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja             | 1 Predikat SAKIP perangkat Daerah                       | Baik      | Baik                   | 100 |



|   |                                                             |   |                                             |      |      |     |
|---|-------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|------|------|-----|
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini pengelolaan keuangan perangkat daerah | WTF  | WTF  | 100 |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran                 | 1 | Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder      | Baik | Baik | 100 |

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa dari indikator kinerja sasaran dapat terealisasi sangat baik dimana Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut berjalan sesuai pelaksanaan yang tepat waktu. Bahkan ada Indikator Kinerja Sasaran yang melampaui Target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Diagram batang dibawah ini :

Gambar 1 : Diagram Batang Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2021



### 3.1.2. **Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Investasi Daerah**

Pada Capaian Sasaran ini dimaksudkan adalah untuk mengetahui ukuran meningkatnya investasi daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar melakukan berbagai upaya dengan melaksanakan Program dan beberapa Kegiatan Prioritas yang telah ditetapkan untuk mencapai indikator kinerja dari sasaran guna Meningkatkan investasi daerah. Pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu mencoba mengukur capaian kinerja untuk semua kegiatan program yang merupakan belanja operasional dan Pemeliharaan serta belanja modal yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar.

#### 3.1.2.1. **Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN**

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Investasi Daerah terdapat Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN Dimana, pada



Indikator ini kita dapat mengetahui Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN dari Tahun ke Tahun yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali

Mandar khususnya di Bidang Penanaman Modal. Untuk memudahkan Perhitungan Indikator ini, berikut ini Data – Data yang mendukung nilai realisasi investasi daerah PMDN . yang dilaksanakan pada Tahun 2021

**Tabel 9 : Data Laporan Nilai Realisasi Investasi Daerah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Polewali Mandar Berdasarkan Nama Perusahaan Tahun 2021**

| NO. | URAIAN                                           | JUMLAH             |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN Tahun 2020 | Rp. 79.507.530.000 |
| 2   | Jumlah Unit                                      | 366 Unit           |
| 3   | Jumlah Tenaga Kerja bekerja pada Perusahaan      | 1383 Orang         |

Berdasarkan Diagram Batang diatas target indikator kinerja nilai investasi daerah PMDN mengalami penurunan nilai realisasi investasi daerah PMDN dari tahun sebelumnya, penurunan indikator ini berkat kurangnya dukungan dari para pelaku usaha untuk mendaftarkan investasi usahanya dan Para pelaku usaha atau perusahaan melaporkan investasinya yang tidak sesuai dengan hasil pemantauan dari tim Penanaman modal kabupaten polewali mandar yang terjun langsung memantau para pelaku usaha. Adapun kegiatan yang mendukung indikator nilai realisasi investasi daerah ini yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota kemudian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal serta Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Dimana dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan adanya peningkatan Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN Kabupaten Polewali Mandar

Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menargetkan sebanyak 98 Milyar Nilai Realisasi investasi Daerah PMDN berdasarkan Nama Perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Polewali Mandar. Target tersebut belum dapat dicapai sesuai target tahun 2021. Dimana Target nilai realisasi investasi daerah PMDN berdasarkan nama perusahaan pada tahun 2021 adalah sebesar 98 Milyar rupiah. Dan Realisasinya sampai akhir tahun 2021 mencapai 79.507.530.000 milyar rupiah, sehingga capaian kinerja dari indikator kinerja nilai realisasi investasi daerah PMDN capaiannya sebesar 81 persen. Ini menandakan capaian hampir mendekati target yang dicanangkan.

Untuk capaian jumlah unit Izin berdasarkan PMDN Nama Perusahaan untuk tahun 2021 sebanyak 366 unit perusahaan dan jumlah penyerapan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebanyak 1383 orang.

Dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja untuk sasaran strategis nilai realisasi investasi daerah PMDN tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 81 persen dengan kata lain target yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 belum recapai. Tapi hasil tersebut mencapai hamper mendekati target yang diinginkan. Terlepas dari masih adanya para pelaku usaha atau perusahaan yang belum mendaftarkan atau melaporkan usaha investasinya dan juga karena Para pelaku usaha itu melaporkan nilai investasinya yang tidak sesuai dengan hasil pemantauan dilapangan oleh Tim Penanaman Modal. sehingga target yang ingin dicapai pada indikator nilai realisasi investasi daerah PMDN itu belum mencapai target tapi hasilnya hampir mendekati target.

Berikut ini Data Laporan Nilai Realisasi Investasi Daerah pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Nama Perusahaan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 10 : Data Laporan Nilai Realisasi Investasi Daerah pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Nama Perusahaan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021**

| NO. | URAIAN                                      | JUMLAH              |                     |                     |                     |                    |                    |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                             | TAHUN 2016          | TAHUN 2017          | TAHUN 2018          | TAHUN 2019          | TAHUN 2020         | TAHUN 2021         |
|     |                                             | (Rp.)               | (Rp.)               | (Rp.)               | (Rp.)               | (Rp.)              | (Rp.)              |
| 1   | Nilai Realisasi PMDN                        | 138.287.000.<br>000 | 148.306.017.<br>594 | 184.427.021.<br>413 | 517.654.000.<br>000 | 99.289.000.<br>000 | 79.507.530.<br>000 |
| 2   | Jumlah Unit Perusahaan                      | 462 Unit            | 401 Unit            | 438 Unit            | 351 Unit            | 563 Unit           | 366 Unit           |
| 3   | Jumlah Tenaga Kerja bekerja pada Perusahaan | 1425 Orang          | 1589 Orang          | 2042 Orang          | 1818 Orang          | 1573 Orang         | 1383 Orang         |

Berdasarkan Tabel diatas bahwa Data Pertumbuhan nilai realisasi investasi daerah berdasarkan PMDN Nama Perusahaan dari Tahun 2016 ke Tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan sedangkan untuk tahun 2019 ke 2021 menunjukkan adanya penurunan indikator target yang ingin dicapai dimana hal ini , seperti dijelaskan diatas karena adanya beberapa factor penyebab tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan.

Adapun kegiatan yang diharapkan mendukung target ini yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota kemudian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal serta Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Dimana dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan adanya peningkatan Nilai Investasi di Daerah Kabupaten Polewali Mandar namun karena adanya factor penyebab sehingga untuk tahun 2021 target nilai realisasi investasi daerah PMDN belum tercapai.



Daerah PMDN dapat diketahui dari **Nilai Investasi yang masuk dalam setiap tahunnya**. Perbandingan capaian kinerja antara target dan realisasi Tahun 2021 untuk Pertumbuhan Nilai Investasi dapat dilihat dari

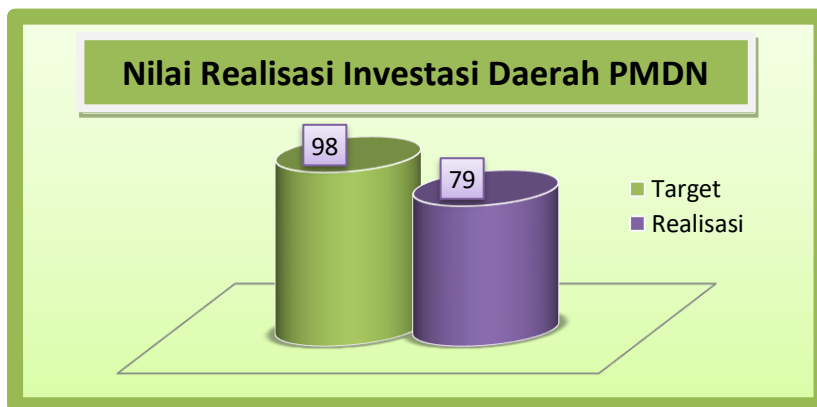
tabel dan diagram batang dibawah ini :

**Tabel 11 : Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN Tahun 2021**

| NO. | INDIKATOR KINERJA                     | SATUAN | TARGET | REALISASI | PERSEN (%) |
|-----|---------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|
| 1   | Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN | Milyar | 98     | 79        | 81         |

Berdasarkan tabel diatas bahwa indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi Daerah telah belum dapat melampau target yang telah ditetapkan.

Gambar 2 : Diagram Batang Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN Tahun 2021.



Adapun Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN adalah sebagai berikut :

Tabel 12 : Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Penunjang Indikator Nilai Realisasi Investasi Daerah Tahun 2021

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                | TARGET      | REALISASI   | %     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
|     |                                                                                                  | Rp.         | Rp.         |       |
| I   | PROGRAM : PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                |             |             |       |
| 1   | KEGIATAN : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |             |             |       |
| 1   | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                | 182,474,000 | 182,319,610 | 99.92 |



|    |                                                                                                          |             |             |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| II | <b>PROGRAM : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                                |             |             |       |
| 1  | <b>KEGIATAN : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> |             |             |       |
| 1  | <i>Sub Kegiatan</i> : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                 | 136,800,000 | 126,303,700 | 92.33 |
| 2  | <i>Sub Kegiatan</i> : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                  | 185,773,000 | 171,010,800 | 92.05 |

Berdasarkan tabel diatas, Program da

Adapun kegiatan yang menunjang indikator kinerja tersebut walaupun belum dapat mencapai target yaitu yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dimana dari



**Gambar 3** : Keikutsertaan DPMPSTP Kabupaten Polewali Mandar pada Acara Kegiatan Rapat Kerja Peningkatan Program dan Kegiatan Penanaman Modal Tingkat Provinsi Tahun 2021

kegiatan tersebut menghasilkan adanya peningkatan Realisasi Anggaran serta pencapaian target pada anggaran yang dikelola.

Secara umum nilai realisasi investasi daerah PMDN belum dapat

melampau target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja tahun 2021 namun ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Masih rendahnya kesadaran perusahaan atau pelaku usaha untuk mendaftarkan atau melaporkan Kegiatan usaha investasi Penanaman Modal (LKPM) secara berkala dan rutin.

2. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA masih belum optimal.
3. Para Pelaku Usaha menyampaikan nilai investasinya yang tidak sesuai dengan kenyataan dari hasil pemantauan dilapangan oleh Tim Penanaman Modal Daerah.

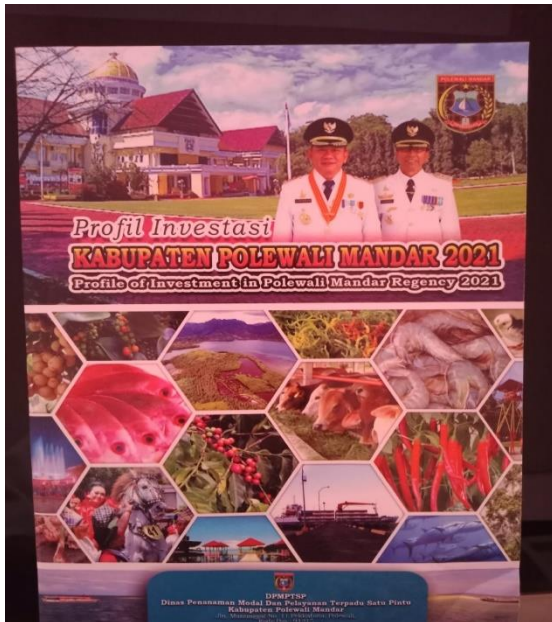
Jadi dalam menghadapi permasalahan ini diperlukan sebuah solusi yaitu :



1. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan PMDN/PMA tentang pentingnya menyampaikan laporan LKPM. Dan perlu ada wacana adanya Reward bagi perusahaan yang rutin menyampaikan LKPM setiap triwulan.
2. Lebih meningkatkan koordinasi dengan perusahaan terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
3. Peningkatan realisasi investasi juga ditunjang oleh kegiatan promosi investasi yang efektif yaitu dengan mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional dan Provinsi Penanaman Modal sehingga nantinya penerapan dan pelaksanaan penanaman modal di daerah dapat memberikan informasi kepada para pelaku usaha atau perusahaan serta para investor.



**Gambar 4 :** Partisipasi DPMPTSP Kabupaten Polewali Mengikuti RAKORNAS PENANAMAN MODAL di Jakarta dan Provinsi Sulawesi Barat



**Gambar 5 :** Buku Profil Investasi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dan Brosur Profil Investasi



Adapun Kegiatan Penanaman Modal dalam setiap tahunnya juga selalu mempersiapkan Buku Sumber Inspirasi dan Investasi di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat yang di terbitkan oleh Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar serta adanya brosur atau leaflet Penanaman Modal.

Kegiatan di bidang Penanaman Modal pada tahun anggaran 2021 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

1. Melakukan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal kepada para Pelaku Usaha / Perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari data kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penanaman Modal yaitu :

**Data Jumlah Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan yang telah dilaksanakan kegiatannya pada tahun 2021.**

| NO. | URAIAN                                      | JUMLAH |
|-----|---------------------------------------------|--------|
| 1   | Jumlah Pemantauan Pelaku Usaha / Perusahaan | 287    |
| 2   | Jumlah Pengawasan Pelaku Usaha / Perusahaan | 20     |
| 3   | Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha / Perusahaan  | 182    |



**KEGIATAN PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL**



**KEGIATAN PEMBINAAN PENANAMAN MODAL**



**KEGIATAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL**



**Gambar 6 : Kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Para Pelaku Usaha / Perusahaan**



2. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Penanaman Modal di Tingkat Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.



3. Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi LKPM dan OSS Kemudahan Berusaha di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.



4. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Sosialisasi LKPM dan OSS Kemudahan Berusaha.



5. Menerbitkan Buku Profil Investasi di Kabupaten Polewali Mandar dan Brosur Profil Investasi Kabupaten Polewali Mandar



Bidang Penanaman Modal melaksanakan 7 indikator Standar Pelayanan Minimal yang menjadi prioritas pengembangan Penanaman Modal di daerah yaitu :

1. Kebijakan Penanaman Modal
2. Kerjasama Penanman Modal
3. Promosi Penanaman Modal
4. Pelayanan Penanaman Modal
5. Pengendalian Penanaman Modal
6. Pengelolaan Data Sistem informasi Penanaman Modal
7. Diklat Penanaman Modal.

Adapun Strategi untuk meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

1. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal dengan melibatkan seluruh stake holder
2. Memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Polewali Mandar dengan meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor.
3. Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi yang lebih efisien dan efektif guna mendorong pesebaran investasi di Kabupaten Polewali Mandar dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah.
4. Meciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha, dan investor dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanganan permasalahan investasi bagi perusahaan PMDN/PMA.

#### **PERBANDINGAN DENGAN STANDAR NASIONAL SPM**

#### **PADA INDIKATOR NILAI IREALISASI INVESTASI DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di Lingkungan Kabupaten Polewali Mandar bahwa Indikator SPM dan Target SPM Tahun 2014 sebagai berikut :



Tabel. 13

## SPM Nasional dengan Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN

| No. | Jenis Pelayanan/Indikator SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | <b>Kebijakan Penanaman Modal</b><br>Tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang usaha unggulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Bidang Usaha |
| 2   | <b>Kerjasama Penanaman Modal</b><br>Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Kali         |
| 3   | <b>Promosi Penanaman Modal</b><br>Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Kali         |
| 4   | <b>Pelayanan Penanaman Modal</b><br>Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal<br>Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (Satu) Kabupaten/Kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota | 100%           |
| 5   | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b><br>Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada Masyarakat dunia usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Kali         |
| 6   | <b>Pengelolaan Data dan sistem informasi penanaman modal</b><br>Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%           |
| 7   | <b>Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal</b><br>Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Kali         |

Dari 7 Indikator SPM tersebut diatas, walaupun tidak menjadi indikator kinerja secara langsung akan tetapi ada indikator tersebut setiap tahunnya selalu dilaksanakan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan SPM Nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. 14

## Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan SPM Nasional

| No. | Jenis Pelayanan/Indikator SPM                                                                        | Target Nasional Tahun 2014 | Realisasi Tahun 2021          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1   | <b>Kebijakan Penanaman Modal</b><br>Tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang usaha unggulan | 1 Bidang Usaha             | 1 Informasi Peluang Investasi |
| 2   | <b>Kerjasama Penanaman Modal</b><br>Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)          | 1 Kali                     | 1 Kali                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 3 | <b>Promosi Penanaman Modal</b><br>Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Kali | 0 Kali |
| 4 | <b>Pelayanan Penanaman Modal</b><br>Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal<br>Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (Satu) Kabupaten/Kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota | 100%   | 100%   |
| 5 | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b><br>Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada Masyarakat dunia usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Kali | 1 Kali |
| 6 | <b>Pengelolaan Data dan sistem informasi penanaman modal</b><br>Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%   | 100%   |
| 7 | <b>Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal</b><br>Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Kali | 2 Kali |

### ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Berdasarkan target indikator kinerja nilai realisasi investasi daerah PMDN untuk tahun 2021 yang belum mencapai target dari target yang diberikan, untuk tahun 2021 dalam pencapaian indikator ini didukung oleh Program dan Kegiatan yang diikuti dan dilaksanakan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota kemudian Sub kegiatan lain yang mendukung yaitu Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal. Dimana dari kegiatan Pembinaan tersebut berusaha untuk menghasilkan adanya peningkatan nilai realisasi Investasi di Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menargetkan sebanyak 98 Milyar Nilai Realisasi investasi Daerah berdasarkan PMDN Nama Perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Polewali Mandar. Namun Target tersebut belum dapat dicapai sesuai target yang direncanakan sehingga capaian kinerja untuk indikator ini mencapai hanya mencapai 81 persen. Dimana Target nilai Realisasi Daerah PMDN berdasarkan nama perusahaan pada tahun 2021 adalah sebesar 98 Milyar rupiah. Dan Realisasinya sampai akhir tahun 2021 mencapai 79 milyar rupiah, sehingga capaian kinerja dari indikator kinerja nilai realisasi investasi daerah capaiannya sebesar 81 persen. Ini menandakan belum tercapainya target yang diinginkan. Adapun factor yang sangat mempengaruhi kurang dapatnya pencapaian target yaitu :

1. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha atau perusahaan dalam mendaftarkan dan melaporkan usaha investasinya dan memperpanjang usaha yang dilakukan.
2. Adanya para pelaku usaha/perusahaan yang melaporkan nilai investasinya yang tidak sesuai dengan hasil pemantauan tim bidang Penanaman Modal

Dengan demikian realisasi target

### **NILAI REALISASI INVESTASI DAERAH PMDN**

Belum dapat mencapai target dan Tapi pencapaiannya dianggap berhasil karena sudah mendekati target yang diinginkan. sekaligus beberapa kegiatan pelaksanaan penanaman modal di daerah sudah memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai dengan kenyataan.

### **CAPAIAN PERSENTASE REALISASI INDIKATOR KINERJA**

**SEBESAR 81 %**

**ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA YANG DILAKUKAN**

indikator kinerja nilai realisasi investasi sangat didukung oleh Sasaran Strategis / Kinerja Utama disertai Anggaran di Bidang Penanaman Modal. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Efisiensi Sumber Daya yang dilakukan di Sektor Urusan Penanaman Modal. Adapun Analisis sumber daya yang dilakukan pada Indikator Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN Dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 15

**ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA YANG DILAKUKAN  
PADA INDIKATOR NILAI REALISASI INVESTASI DAERAH PMDN**

| No. | Sasaran Strategis/Kinerja Utama          | Anggaran Tahun 2021 | Realisasi Anggaran | Persentase |
|-----|------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| 1   | Promosi Penanaman Modal                  | 341,948,000         | 341,160,285        | 99.77      |
| 2   | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 322,573,000         | 297,314,500        | 92.17      |

**ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN****PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

indikator kinerja nilai realisasi investasi daerah PMDN sangat didukung oleh Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan di Bidang Penanaman Modal. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Program dan Kegiatan Penunjang keberhasilan pencapaian Kinerja Indikator Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN Dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 16

| ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA<br>NILAI REALISASI INVESTASI DAERAH TAHUN 2020 |                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Jabatan                                                                                                                          | Kinerja Utama                                                  | Indikator Kinerja                                                | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Target    | Realisasi | % Capaian |
| Kepala Bidang Penanaman Modal                                                                                                    | Meningkatnya nilai realisasi investasi daerah                  | 1 Nilai realisasi investasi daerah PMDN                          | 1. Program Pengendalian Pel;aksanaan Penanaman Modal                                                                                                                                                                                      | 100%      | 81%       | 81%       |
|                                                                                                                                  |                                                                | 2 Jumlah Investor                                                | 2. Program Promosi Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                        | 100%      | 81%       | 81%       |
| Kepala Seksi Perencanaan, Pengendalian Sistem Informasi dan Pengawasan Penanaman Modal                                           | Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal | 1 Jumlah dokumen laporan kegiatan Pemantauan penanaman modal     | <b>Program</b> Pengendalian Pel;aksanaan Penanaman Modal<br><b>Kegiatan</b> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | 4 Laporan | 4 Laporan | 100%      |
|                                                                                                                                  |                                                                | 2 Jumlah dokumen laporan kegiatan Pembinaan penanaman modal      | <b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal<br><b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                           | 4 Laporan | 4 Laporan | 100%      |
| Kepala Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal                                                                      | Meningkatnya jumlah promosi dan penanaman modal                | 1 Frekuensi penyelenggaraan pameran penanaman modal yang diikuti | <b>Program</b> Promosi Penanaman Modal<br><b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota<br><b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 1 Kali    | 0 Kali    | 0%        |

### 3.1.3. Capaian Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pada Capaian Sasaran ini dimaksudkan adalah untuk mengetahui ukuran peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar melakukan berbagai upaya dengan melaksanakan Program dan beberapa Kegiatan Prioritas yang telah ditetapkan untuk mencapai indikator kinerja dari sasaran guna Meningkatkan kualitas Pelayanan perizinan. Pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu mencoba mengukur capaian kinerja untuk semua kegiatan program yang merupakan belanja operasional dan Pemeliharaan serta belanja modal yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar.

#### 3.1.3.1 Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan



Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting

seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.



Dalam mengamatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

***Adapun Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Yaitu :***

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

***Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :***

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

***Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:***

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Ada tahapan dalam Menyusun survei indeks kepuasan masyarakat , yaitu :

| TAHAPAN PENYUSUNAN SURVEI IKM |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                             | Pengumpulan Data Survei Indeks Kepuasan Masyarakat |
| 2                             | Hasil Pengolahan Data IKM                          |
| 3                             | Analisis Hasil SKM                                 |

## TAHAPAN 1

### Pengumpulan Data Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan pada pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu.

Metode Pengumpulan Data Pelaksanaan SKM menggunakan iPad kepada pengguna layanan yang terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu yaitu :

- Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan

dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

- Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Populasi seluruh masyarakat yang mengurus Perizinan sebanyak 1900 Masyarakat yang mengurus Izin di DPMPTSP yang di jadikan Sample sebanyak 325 Responden

#### **1. Lokasi Pengumpulan Data**

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di loket penyerahan izin pada ruang pelayanan DPMPTSP pada waktu jam layanan sedang berlangsung atau jam kerja layanan

#### **2. Waktu Pelaksanaan SKM**

Berdasarkan jadwal yang ditentukan, survey kepuasan masyarakat dilaksanakan mulai tanggal 23 Juni sampai dengan 01 November 2021 di Kantor DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Kegiatan                           | Waktu Pelaksanaan    | Lama Waktu |
|-----|------------------------------------|----------------------|------------|
| 1   | Persiapan2                         | Juni 2021            | 2 Hari     |
| 2   | Pengumpulan data                   | Juni – November 2021 | 6 Bulan    |
| 3   | Pengolahan Data dan analisis Hasil | November 2021        | 2 Hari     |
| 4   | Penyusunan dan Pelaporan Hasil     | November 20212       | Hari       |

### 3. Penentuan Jumlah Responden

Jumlah responden/sampel penelitian menggunakan tabelvjDalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2021, maka populasi penerima layanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu adalah sebanyak 1900 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak sebanyak 325 dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan.

| Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 10           | 10         | 220          | 140        | 1200         | 291        |
| 15           | 14         | 230          | 144        | 1300         | 297        |
| 20           | 19         | 240          | 148        | 1400         | 302        |
| 25           | 24         | 250          | 152        | 1500         | 306        |
| 30           | 28         | 260          | 155        | 1600         | 310        |
| 35           | 32         | 270          | 159        | 1700         | 313        |
| 40           | 36         | 280          | 162        | 1800         | 317        |
| 45           | 40         | 290          | 165        | 1900         | 320        |
| 50           | 44         | 300          | 169        | 2000         | 322        |
| 55           | 48         | 320          | 175        | 2200         | 327        |
| 60           | 52         | 340          | 181        | 2400         | 331        |
| 65           | 56         | 360          | 186        | 2600         | 335        |
| 70           | 59         | 380          | 191        | 2800         | 338        |
| 75           | 63         | 400          | 196        | 3000         | 341        |
| 80           | 66         | 420          | 201        | 3500         | 346        |
| 85           | 70         | 440          | 205        | 4000         | 351        |
| 90           | 73         | 460          | 210        | 4500         | 354        |
| 95           | 76         | 480          | 214        | 5000         | 357        |
| 100          | 80         | 500          | 217        | 6000         | 361        |
| 110          | 86         | 550          | 226        | 7000         | 364        |
| 120          | 92         | 600          | 234        | 8000         | 367        |
| 130          | 97         | 650          | 242        | 9000         | 368        |

## TAHAPAN 2

## Hasil Pengolahan Data Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah Responden Survei IKM Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu **325** orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

| No | KARAKTERISTIK | INDIKATOR   | JUMLAH | PERSENTASE |
|----|---------------|-------------|--------|------------|
| 1  | JENIS KELAMIN | LAKI        | 145    | 39%        |
|    |               | PEREMPUAN   | 180    | 61%        |
| 2  | PENDIDIKAN    | SD KE BAWAH | 0      | 0%         |
|    |               | SLTA        | 53     | 25%        |
|    |               | DIII        | 0      | 0          |
|    |               | SI          | 267    | 73%        |
|    |               | S2          | 5      | 2%         |
| 3  | PEKERJAAN     | PNS         | 28     | 15%        |
|    |               | SWASTA      | 15     | 10%        |
|    |               | WIRUSAHA    | 77     | 26%        |
|    |               | LAINNYA     | 205    | 47%        |
| 4  | JENIS LAYANAN | LAYANAN A   | 170    | 57%        |
|    |               | LAYANAN B   | 155    | 43%        |



- **Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)**

Indeks Kepuasan Masyarakat ( Unit Layanan dan Per Unsur Layanan

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

| <b>Nilai Unsur Pelayanan</b> |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                              | U1                                | U2   | U3   | U4   | U5   | U6   | U7   | U8   | U9   |
| <b>IKM per unsur</b>         | 3,88                              | 3,87 | 3,87 | 3,89 | 3,87 | 3,88 | 3,88 | 3,87 | 3,87 |
| <b>Kategori</b>              | A                                 | A    | A    | A    | A    | A    | A    | A    | A    |
| <b>IKM Unit Layanan</b>      | <b>96.96 (A atau Sangat Baik)</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |

**LAMPIRAN HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**

Lampiran I

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Tanggal Survei : \_\_\_\_\_ Jam Survei :  08.00 - 12.00\*  
 13.00 - 15.00\*

---

PROFIL

Jenis Kelamin :  L  P      Usia : \_\_\_\_\_ Tahun

Pendidikan :  SD  SMP  SMA  S1  S2  S3

Pekerjaan :  SWASTA  WIRUSAHA  LAINNYA (sebutkan)

Asal Pelanggan :  PERORANGAN  PERUSAHAAN  PENGURUS

Jenis Layanan yang diterima : .....

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN  
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Apakah Saudara dapat memahami persyaratan pelayanan yang tersedia di PTSP KKP</p> <p>a. Tidak dipahami      1</p> <p>b. Kurang dipahami      2</p> <p>c. Dipahami      3</p> <p>d. Sangat dipahami      4</p>                          | <p>6. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan</p> <p>a. Tidak Kompeten      1</p> <p>b. Kurang Kompeten      2</p> <p>c. Kompeten      3</p> <p>d. Sangat Kompeten      4</p>                                         |
| <p>2. Bagaimana Pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di PTSP KKP</p> <p>a. Tidak Mudah      1</p> <p>b. Kurang Mudah      2</p> <p>c. Mudah      3</p> <p>d. Sangat Mudah      4</p>                                       | <p>6. Bagaimana Pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan</p> <p>a. Tidak Sopan dan Ramah      1</p> <p>b. Kurang Sopan dan Ramah      2</p> <p>c. Sopan dan Ramah      3</p> <p>d. Sangat Sopan dan Ramah      4</p> |
| <p>3. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kecepatan waktu penyelesaian dalam memberikan pelayanan</p> <p>a. Tidak Cepat      1</p> <p>b. Kurang Cepat      2</p> <p>c. Cepat      3</p> <p>d. Sangat Cepat      4</p>                         | <p>8. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana</p> <p>a. Buruk      1</p> <p>b. Cukup      2</p> <p>c. Baik      3</p> <p>d. Sangat Baik      4</p>                                                                                   |
| <p>4. Apakah produk hasil perizinan yang diterbitkan telah memenuhi ketepatan mutu pelayanan yang dijanjikan</p> <p>a. Tidak Memenuhi      1</p> <p>b. Kurang Memenuhi      2</p> <p>c. Memenuhi      3</p> <p>d. Sangat Memenuhi      4</p> | <p>9. Bagaimana pendapat Saudara tentang fasilitas penanganan pengaduan pengguna layanan</p> <p>a. Tidak Tersedia      1</p> <p>b. Ada tetapi tidak berfungsi      2</p> <p>c. Berfungsi kurang maksimal      3</p> <p>d. Dikelola dengan baik      4</p>     |
| <p>5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan</p> <p>a. Sangat Mahal      1</p> <p>b. Cukup Mahal      2</p> <p>c. Murah      3</p> <p>d. Gratis      4</p>                                                 | <p style="text-align: center;">Saran Perbaikan</p> <p>.....</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                  |

**PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

UNIT PELAYANAN :  
ALAMAT :  
Tlp/Fax. :

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali kode Pos 91315

| NO.<br>RESP | NILAI UNSUR PELAYANAN |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|             | U1                    | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| 1           | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 2           | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 3           | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 4           | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 5           | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 6           | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 7           | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 8           | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 9           | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 10          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 11          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 12          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 13          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 14          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 15          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 16          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 17          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 18          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 19          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 20          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 21          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 22          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 23          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 24          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 25          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 26          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 27          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 28          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 29          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 30          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 31          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 32          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 33          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 34          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 35          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 36          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 37          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 38          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 39          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 40          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 41          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 42          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 43          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 44          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 45          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 46          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 47          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 48          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 49          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 50          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 51          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 52          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 53          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 54          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 55          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 56          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 57          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 58          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 59          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 60          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 61          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 62          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 63          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 64          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 65          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 66          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 67          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 68          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 70  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 71  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 72  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 73  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 74  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 75  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 76  | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 77  | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 78  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 79  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 80  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 81  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 82  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 83  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 84  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 85  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 86  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 87  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 88  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 89  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 90  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 91  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 92  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 93  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 94  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 95  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 96  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 97  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 98  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 99  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 126 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 131 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 136 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 137 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 138 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 139 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 141 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 146 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 147 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 149 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 152 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 154 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 155 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 156 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 157 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 158 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 159 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 161 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 162 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 163 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 164 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 165 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 166 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 167 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 168 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 169 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 170 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 171 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 172 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 173 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 174 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 175 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 176 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 177 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 178 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 179 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 181 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 182 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 183 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 184 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 185 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 186 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 187 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 188 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 189 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 190 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 191 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 192 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 193 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 194 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 195 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 196 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 197 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 198 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 199 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 201 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 202 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 203 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 204 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 205 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 206 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 207 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 208 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 209 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 210 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 211 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 212 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 213 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 214 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 215 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 216 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 218 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 219 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 220 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 221 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 222 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 223 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 224 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 225 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 226 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 227 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 228 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 229 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 230 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 231 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 232 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 233 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 234 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 235 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 236 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 237 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 238 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 239 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 240 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 241 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 242 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 243 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 244 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 245 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 246 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 247 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 248 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 249 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 250 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 251 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 252 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 253 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 254 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 255 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 256 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 257 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 258 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 259 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 260 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 261 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 262 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 263 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 264 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 265 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 266 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 267 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 268 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 269 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 270 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 271 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 272 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 273 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 274 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 275 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 276 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 277 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 278 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 279 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 280 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 281 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 282 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 283 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 284 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 285 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 286 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 287 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 288 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 289 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 290 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |



|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 292                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 293                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 294                | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 295                | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     |
| 296                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 297                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 298                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 299                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 300                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 301                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 302                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 303                | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 304                | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 305                | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 306                | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 307                | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 308                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 309                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 310                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 311                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 312                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 313                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 314                | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 315                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 316                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 317                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 318                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 319                | 4     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 320                | 4     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     |
| 321                | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     |
| 322                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 323                | 4     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 324                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 325                | 3     | 1     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     |
| ΣNilai /Unsur      | 1260  | 1257  | 1258  | 1265  | 1259  | 1262  | 1260  | 1257  | 1257  |
| NRR / Unsur        | 3.88  | 3.87  | 3.87  | 3.89  | 3.87  | 3.88  | 3.88  | 3.87  | 3.87  |
| NRR tertbg/ unsur  | 0.431 | 0.430 | 0.430 | 0.432 | 0.430 | 0.431 | 0.431 | 0.430 | 0.430 |
| IKM Unit pelayanan |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.88  |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       | 96.9  |

**Keterangan :**

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- \*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- \*\*) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi

NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,11

per unsur

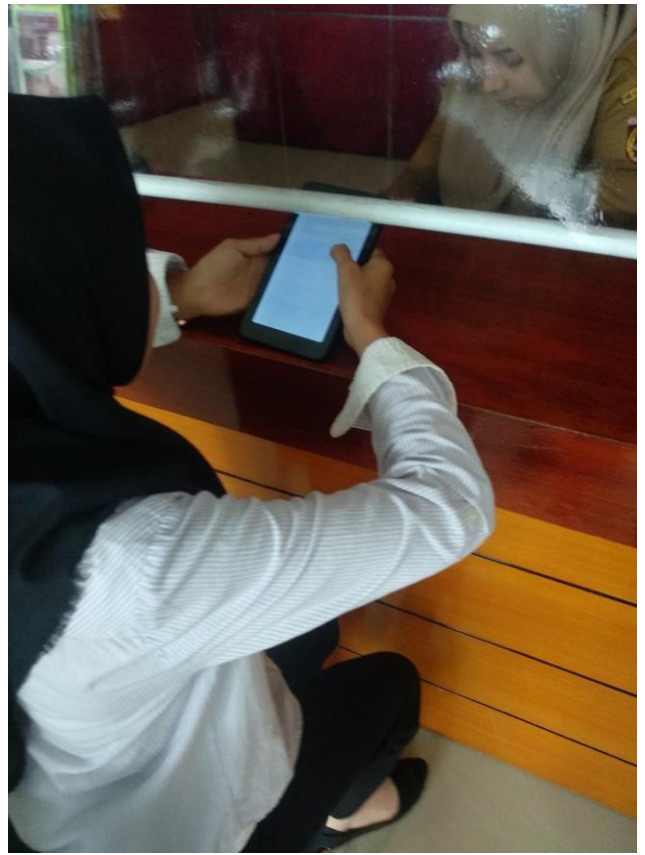
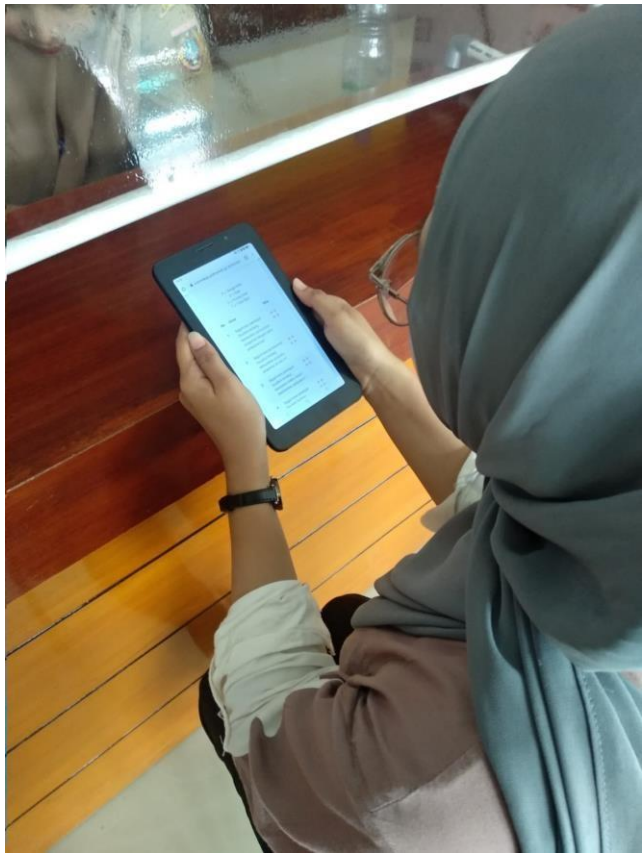
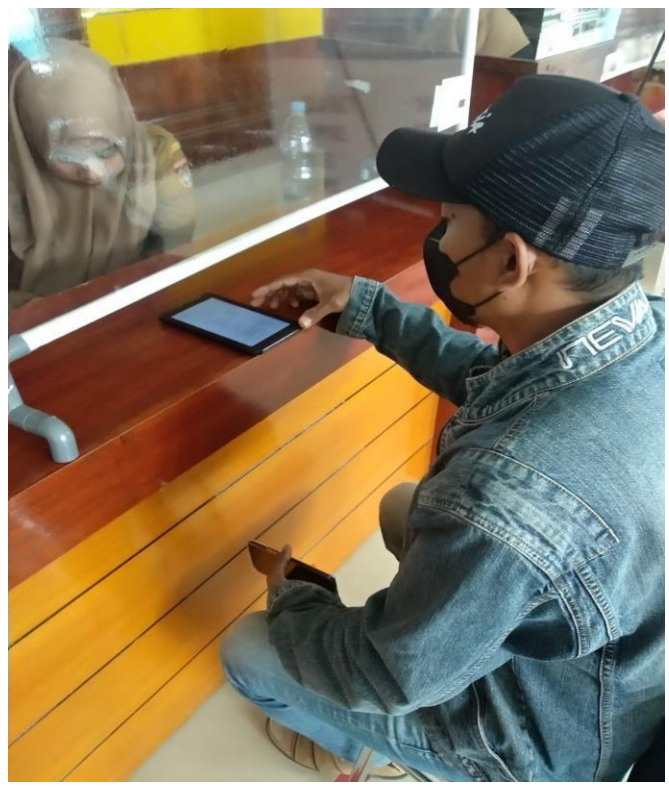
**IKM UNIT PELAYANAN : 96.9**

**Mutu Pelayanan :**

- A (Sangat Baik) : 88,31-100,00
- B (Baik) : 76,61-88,30
- C (Kurang Baik) : 65,00-76,60
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

| No. | UNSUR PELAYANAN                         | NILAI RATA-RATA |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
| U1  | Persyaratan                             | 3.88            |
| U2  | Sistim, Mekanisme dan Prosedur          | 3.87            |
| U3  | Waktu Penyelesaian                      | 3.87            |
| U4  | Biaya/Tarif                             | 3.89            |
| U5  | Produk Spesifikasi jenis pelayanan      | 3.87            |
| U6  | Kompetensi pelaksana                    | 3.88            |
| U7  | Perilaku Pelaksana                      | 3.88            |
| U8  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.87            |
| U9  | Sarana dan Prasarana                    | 3.87            |

Dokumentasi Pengisian SKM





**TAHAPAN 3**

**Analisis Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat**

Analisis Permasalahan / Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan Pada umumnya setiap unsur dari 9 layanan yang disurvei menunjukkan nilai A (Sangat Baik), hanya saja masih ada 5 Unsur yang perlu ditingkatkan seperti Sistem Mekanisme dan Prusedur, Waktu Penyelesaian, Produk Spesifikasi Jenis Layanan , Penganan Pengaduan, Saran dan Masukan dan sarana dan prasarana Rencana Tindak Lanjut dari 5 unsur yang perlu tingkatkan, 2 unsur yang diprioritaskan untuk di tindak lanjuti, hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Dibuatkan rencana tindak lanjut perbaikan.

Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya sebagai berikut :

| No. | Unsur              | Program / Kegiatan                          | Waktu Prioritas |              |               |                   |           | Penanggung Jawab |
|-----|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|------------------|
|     |                    |                                             | T<br>W<br>I     | T<br>W<br>II | T<br>W<br>III | T<br>W<br>IV<br>V |           |                  |
| 1   | Waktu Penyelesaian | Peningkatan sosialisasi registrasi "online" |                 |              |               | √                 | DPMPPT SP |                  |

|   |                           |                                                              |  |  |  |   |     |
|---|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|---|-----|
| 2 | <b>Prosedur Pelayanan</b> | Lakukan monitoring dan evaluasit terhadap prosedur pelayanan |  |  |  | √ | ... |
|---|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|---|-----|

Tren Nilai Survei IKM Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dilihat melalui Tabel berikut :

| <b>Tren Kinerja Pelayanan</b> |       |           |
|-------------------------------|-------|-----------|
| NO.                           | TAHUN | NILAI IKM |
| 1                             | 2019  | 84,41     |
| 2                             | 2020  | 85.36     |
| 3                             | 2021  | 96.96     |

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 hingga 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Untuk itu pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdapat Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan Dimana, pada Indikator ini kita dapat mengetahui hasil pengolahan indeks kepuasan masyarakat (IKM) per periode waktu yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar khususnya di Bidang Pelayanan Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan . Untuk memudahkan Perhitungan Indikator ini, berikut ini Data – Data yang mendukung data capaian indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan pada Tahun 2021.

Adapun Metode Perhitungan dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan itu melalui hasil pengolahan IKM per periode waktu. Berdasarkan Keputusan MENPAN memuat 9 unsur Pelayanan yang harus di ukur yaitu:

**Tabel 17 : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tentang persepsi/pendapat responden tentang Pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021**

| Nomor | Unsur Pelayanan                    | Nilai Rata-Rata |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1     | Persyaratan Pelayanan              | 3,88            |
| 2     | Sistem, Mekanisme dan Prosedur     | 3,87            |
| 3     | Waktu Penyelesaian                 | 3,87            |
| 4     | Biaya/Tarif                        | 3,89            |
| 5     | Produk spesifikasi jenis pelayanan | 3,87            |
| 6     | Kompetensi Pelaksana               | 3,88            |



|   |                                         |      |
|---|-----------------------------------------|------|
| 7 | Perilaku Pelaksana                      | 3,88 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3,87 |
| 9 | Sarana dan Prasarana                    | 3,87 |

## NILAI PER UNSUR :

### INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) :

**96,96**

Berdasarkan Data hasil Pengolahan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 18 : Data hasil Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Periode Tahun 2021**

| NO. | INDIKATOR                                             | SATUAN | TARGET | REALISASI | %   |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----|
| 1   | Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Persen | 86     | 96,96     | 111 |

Berdasarkan Diagram Batang diatas target indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sudah dapat tercapai bahkan melampau target yang dicanangkan, pencapaian indikator ini juga terealisasi berkat adanya dukungan Program dan Kegiatan yang diikuti dan dilaksanakan yaitu Program Pelayanan Penanman Modal di Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan dengan dukungan kegiatan yaitu Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dan

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan. Dimana dari Sub Kegiatan tersebut menghasilkan adanya peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.

Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menargetkan sebanyak 86 Persen Peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan lewat hasil Pengolahan IKM yang dilakukan. Target tersebut dapat dicapai dan bahkan melampau target sebanyak 96,96 Persen sehingga capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 111 persen. Sehingga capaian kinerja dari indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan capaiannya melampau target.

Dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 111 persen dengan kata lain terget yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 tercapai dan melampau target. Hasil tersebut tidak lepas dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar sehingga dapat mendorong adanya peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan..

Berikut ini Data Laporan Hasil Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 19 : Data Laporan Hasil Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021**

| NO. | URAIAN                                                                             | IKM PER PRIODE WAKTU (TAHUN) |        |        |      |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|------|-------|
|     |                                                                                    | 2017                         | 2018   | 2019   | 2020 | 2021  |
| 1   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan Hasil Pengolahan IKM per Priode Waktu | 79,57%                       | 80,20% | 84,41% | 85%  | 96,96 |

Berdasarkan Tabel diatas bahwa Data Pertumbuhan hasil pengolahan IKM dari Tahun ke Tahun menunjukkan adanya peningkatan persentase, dimana hal ini pencapaian indikator ini juga terealisasi berkat adanya dukungan Program dan Kegiatan yang diikuti dan dilaksanakan.

Adapun Perbandingan capaian kinerja antara target dan realisasi Tahun 2021 untuk Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilihat dari diagram garis dibawah ini :

**Gambar 7 : Diagram Garis Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021**

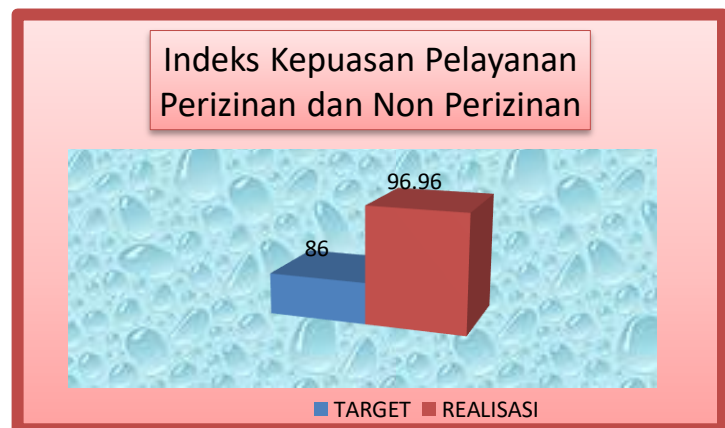


**Tabel 20 : Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021.**

| NO. | INDIKATOR KINERJA                                     | SATUAN | TARGET | REALISASI | PERSEN (%) |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|
| 1   | Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Persen | 86     | 96,96     | 111        |

Berdasarkan tabel diatas bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan telah melampau target yang telah ditetapkan.

**Gambar 8: Diagram Batang Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021.**



Adapun Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagai berikut :

**Tabel 21 : Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Penunjang Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021**

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN                  | TARGET | REALISASI | % |
|-----|-------------------------------------|--------|-----------|---|
|     |                                     | Rp.    | Rp.       |   |
| I   | PROGRAM : PELAYANAN PENANAMAN MODAL |        |           |   |

|   |                                                                                                                                                           |            |            |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1 | <b>KEGIATAN :</b> Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota  |            |            |       |
| 1 | <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 64,052,000 | 63,836,300 | 99.66 |
| 2 | <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan            | 68,000,000 | 67,637,600 | 99.47 |

Berdasarkan tabel diatas, Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari 1 Program, 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan. Adapun kegiatan yang menunjang indikator kinerja tersebut yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik kemudian Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan. Dimana dari kegiatan tersebut menghasilkan adanya peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.





Dari 9 unsur pelayanan, beberapa unsur pelayanan mengalami kenaikan dibandingkan dengan hasil penilaian SKM yang dilaksanakan pada tahun 2020.

Nilai Unsur Kepuasan Masyarakat terendah untuk IKM Tahun 2021 ini adalah Waktu Pelayanan (U3) dengan nilai unsur pelayanan **3,87**, sedangkan nilai Unsur Kepuasan Masyarakat yang tertinggi yakni unsur Biaya/Tarif (U4) dengan nilai 3,89.

Hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kab. Polewali Mandar untuk tahun 2021 ini mendapat nilai **96,96** yang berarti masuk dalam kategori nilai kualitatif kepuasan **“Sangat Baik”** dengan nilai huruf **“A”**.



**Gambar 9 :** Kegiatan Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar

Beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai evaluasi dan perbaikan pelayanan di masa yang akan datang adalah :

1. Perlunya peningkatan kualitas SDM dengan pelaksanaan training/pelatihan Team Building & Service Excellence, petugas pelaksana pelayanan dapat memahami tata cara yang baik dan benar , agar dalam implementasi dalam pelayanan tidak ada lagi kesan diskriminasi dalam memberikan pelayanan perizinan.

2. Perbaiki strategi sosialisasi secara meluas terkait waktu pengurusan serta biaya pengurusan izin sehingga masyarakat/pelaku usaha mengetahui izin yang bertribusi dan izin non retribusi.
3. Penerapan sistem pendaftaran izin secara online, serta membuka loket pelayanan di tingkat kecamatan yang jaraknya jauh dengan DPMPTSP.
4. Penerapan loket Advise Plan serta loket Bank SulBar sebagai tempat pembayaran retribusi perizinan.
5. Sosialisasi secara meluas tentang keberadaan Kantor DPMPTSP dan jenis izin yang dilayani.

Perlunya data pembandingan antar unit pelayanan terhadap nilai SKM yang diperoleh, sehingga dapat diketahui posisi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu terhadap unit pelayanan yang lain.

Hal ini dapat memacu persaingan yang positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Kab. Polewali Mandar dalam upaya mendorong penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

#### **PERBANDINGAN DENGAN STANDAR NASIONAL SPM**

#### **PADA PERSENTASE SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di Lingkungan Kabupaten Polewali Mandar bahwa Indikator SPM dan Target SPM Tahun 2014 sebagai berikut :

**Tabel. 22**  
**SPM Nasional pada Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

| No. | Jenis Pelayanan/Indikator SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | <b>Kebijakan Penanaman Modal</b><br>Tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang usaha unggulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Bidang Usaha |
| 2   | <b>Kerjasama Penanaman Modal</b><br>Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Kali         |
| 3   | <b>Promosi Penanaman Modal</b><br>Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Kali         |
| 4   | <b>Pelayanan Penanaman Modal</b><br>Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal<br>Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (Satu) Kabupaten/Kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota | 100%           |
| 5   | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b><br>Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada Masyarakat dunia usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Kali         |
| 6   | <b>Pengelolaan Data dan sistem informasi penanaman modal</b><br>Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%           |
| 7   | <b>Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal</b><br>Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Kali         |

Dari 7 Indikator SPM tersebut diatas, walaupun tidak menjadi indikator kinerja secara langsung akan tetapi indikator tersebut setiap tahunnya selalu dilaksanakan. Untuk Perbandingan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ada hubungannya pada indikator **Pelayanan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan sistem informasi penanaman modal**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tahun 2021 dengan SPM Nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. 23

## Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tahun 2021 dengan SPM Nasional

| No. | Jenis Pelayanan/Indikator SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Nasional Tahun 2014 | Realisasi Tahun 2021 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 4   | <b>Pelayanan Penanaman Modal</b><br>Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal<br>Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (Satu) Kabupaten/Kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota | 100%                       | 100%                 |
| 6   | <b>Pengelolaan Data dan sistem informasi penanaman modal</b><br>Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                       | 100%                 |

**ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

Berdasarkan target indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan** sudah dapat tercapai, bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator ini juga terealisasi berkat adanya dukungan Program dan Kegiatan yang diikuti dan dilaksanakan yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal kemudian kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Dan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik serta Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar untuk indicator kinerja **Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan** menargetkan 86 % Nilai persentase IKM. Target tersebut dapat dicapai sesuai target dan melebihi target yaitu nilai IKM tahun 2021 sebesar 96,96 % sehingga capaian kinerja untuk indikator ini mencapai melebihi 100 persen. Sehingga Persentase capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut capaiannya sebesar 111 persen. Ini menandakan kelonjakan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian realisasi target **INDEKS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN** dapat mencapai target dan sekaligus melampau capaian tersebut dengan demikian target indicator ini dikategorikan **BERHASIL.**

### ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA YANG DILAKUKAN

indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sangat didukung oleh Sasaran Strategis / Kinerja Utama disertai Anggaran di Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Efisiensi Sumber Daya yang dilakukan di Sektor Urusan Perizinan. Adapun Analisis sumber daya yang dilakukan pada Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 24

#### ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA YANG DILAKUKAN PADA INDIKATOR INDEKS KEPUASAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

| No. | Sasaran Strategis / Kinerja Utama | Anggaran Tahun 2021 | Realisasi Anggaran | Persentase |
|-----|-----------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| 1   | Program Pelayanan Penanaman Modal | 260,052,000         | 259,380,000        | 99.74      |



## ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

indikator kinerja pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sangat didukung oleh Program dan Kegiatan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Program dan Kegiatan Penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja pada Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel. 25**

| ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tahun 2021 |                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Jabatan                                                                                                                                               | Kinerja Utama                                                                      | Indikator Kinerja                                                               | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target                                                                                                                                         | Realisasi  | % Capaian  |
| Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Perizinan                                                                                                     | Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan                          | 1<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                      | <b>Program</b> Pelayanan Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86%                                                                                                                                            | 96%        | 111%       |
| Kepala Seksi Pendaftaran Verifikasi dan Pelaporan Perizinan                                                                                           | Meningkatnya Kualitas Pendaftaran dan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan        | 1<br>Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi elektronik | <b>Program</b> : Pelayanan Penanaman Modal<br><b>Kegiatan</b> : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupater/ Kota                                                                                                                                                   | 2500 Izin                                                                                                                                      | 3234 Izin  | 129%       |
|                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2<br>Jumlah laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 12 Dokumen | 12 Dokumen |
| Ka.Seksi Layanan Informasi Pengaduan Konsultasi Pengawasan dan Penyuluhan                                                                             | Meningkatnya Kualitas Penanganan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan | 1<br>Jumlah Laporan Layanan Pengaduan dan Informasi yang di Tindaklanjuti       | <b>Program</b> : Pelayanan Penanaman Modal<br><b>Kegiatan</b> : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota<br><b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan |                                                                                                                                                | 12 Dokumen | 12 Dokumen |

**DOKUMEN DATA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**LAPORAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN**



Sebagai gambaran capaian kinerja Dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar pada Lingkup Bidang Perizinan maka data jumlah izin yang diterbitkan atau di tindaklanjuti Tahun 2016 sampai Tahun 2021 dapat ditampilkan pada tabel dan diagram batang dibawah ini :

**Gambar 12 : Suasana Pelayanan Perizinan**

**Tabel 26 : Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 s/d Tahun 2021.**

| No | Jenis Izin               |      |      |      |      |      |      |
|----|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|    |                          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1  | IGTU                     | 482  | 429  | 422  | 242  | -    | -    |
| 2  | IUJK                     | 92   | 42   | 32   | 59   | 46   | 3    |
| 3  | SIUP                     | 479  | 421  | 422  | 328  | 473  | 370  |
| 4  | TDP                      | 464  | 421  | 405  | 58   | -    | -    |
| 5  | SIUI                     | 32   | 28   | 19   | 10   | 5    | 5    |
| 6  | TDG                      | 2    | 1    | 15   | 10   | 7    | 16   |
| 7  | IMB                      | 1281 | 1602 | 1683 | 1205 | 1035 | 1009 |
| 8  | Izin Pelataran           | 4    | 0    | 0    | -    | -    | -    |
| 9  | Izin Reklame             | 1    | 0    | 0    | -    | -    | -    |
| 10 | I. Trayek (Karwas))      | 126  | 40   | 26   | 3    | -    | -    |
| 11 | SIUSP/TDUP               | 11   | 5    | 18   | -    | -    | 14   |
| 12 | Izin Praktek Dokter      | 22   | 82   | 89   | 68   | 67   | 138  |
| 13 | Izin Praktek Dokter Gigi | -    | -    | -    | 16   | 12   | -    |

|    |                                          |     |     |     |      |     |     |
|----|------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 14 | Izin Praktek Dokter Spesialis            | -   | -   | -   | 15   | 16  | -   |
| 15 | Izin Praktek Bidan                       | 14  | 67  | 415 | 126  | 109 | 307 |
| 16 | Izin Praktek Perawat                     | 2   | 116 | 430 | 154  | 114 | 175 |
| 17 | Izin Usaha Sarana Pariwisata             | -   | -   | -   | -    | -   | -   |
| 18 | Izin Apotik                              | 14  | 22  | 12  | 16   | 19  | 23  |
| 19 | Izin Toko Obat                           | 0   | 1   | 2   | -    | 1   | 1   |
| 20 | Izin Pendirian Apoteker                  | -   | -   | -   | -    | -   | -   |
| 21 | TDU/Penggilingan Padi                    | 12  | 20  | 6   | 8    | 2   | 1   |
| 22 | Izin Penelitian                          | 729 | 651 | 733 | 1142 | 379 | 896 |
| 23 | Izin Prinsip                             | 10  | 18  | 28  | -    | -   | -   |
| 24 | Izin Lokasi                              | 4   | 10  | 2   | 13   | 3   | 1   |
| 25 | Izin Lingkungan                          | 3   | 21  | 16  | 22   | 7   | 3   |
| 26 | IUSP                                     | 6   | 2   | 7   | 4    | 1   | -   |
| 27 | Izin Operasional PAUD/TK                 | -   | 3   | 102 | 118  | 14  | -   |
| 28 | Izin Operasional .PKBM,TBM & LKP         | -   | 2   | 14  | 12   | 7   | -   |
| 29 | Izin Pendirian Klinik                    | 2   | 77  | 2   | 3    | -   | -   |
| 30 | Izin Mendirikan Rumah Sakit              | 2   | 27  | 0   | -    | -   | -   |
| 31 | Izin Terapis Gigi & Mulut                | -   | 6   | 3   | 4    | 9   | -   |
| 32 | SIP – ATML                               | -   | 8   | 20  | 7    | 7   | 23  |
| 33 | Izin Kerja Tehnis Farmasi                | -   | 2   | 8   | 7    | 4   | 26  |
| 34 | Izin Optik                               | -   | -   | 2   | -    | -   | -   |
| 35 | Izin K. REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS | -   | -   | 1   | 2    | -   | -   |
| 36 | Izin Praktik Tenaga Giizi                | -   | -   | 4   | 3    | -   | 3   |
| 37 | I. Praktek Radiografer                   | -   | -   | 6   | 6    | -   | 4   |
| 38 | Izin Operasional. SD DAN SMP             | -   | -   | 1   | 1    | -   | -   |
| 39 | Izin Apoteker                            | -   | -   | 33  | 30   | 30  | 68  |
| 40 | Izin Operasional Klinik                  | -   | -   | 3   | 3    | -   | 3   |

|    |                                                                                   |   |   |   |    |    |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|
| 41 | Izin Penyelenggaraan Puskesmas                                                    | - | - | 9 | 9  | 1  | -  |
| 42 | TDI                                                                               | - | - | - | 21 | -  | 2  |
| 43 | Izin Laboratorium Klinik                                                          | - | - | - | 1  | -  | -  |
| 44 | Izin Praktik Fisioterafis                                                         | - | - | - | 3  | -  | 3  |
| 45 | Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisatawan                                           | - | - | - | 1  | -  | -  |
| 46 | Tanda Daftar Usaha Jasa Makan Minum                                               | - | - | - | 5  | 5  | -  |
| 47 | Tanda Daftar Penyediaan Akomodasi                                                 | - | - | - | 3  | 4  | -  |
| 48 | Izin Penyimpangan Sementara Limbah B3                                             | - | - | - | -  | 1  | -  |
| 49 | Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)                                                | - | - | - | -  | 7  | -  |
| 50 | Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D                                         | - | - | - | -  | 3  | -  |
| 51 | Izin Usaha Industri Rumah Tangga Pangan                                           | - | - | - | -  | 29 | -  |
| 52 | Izin Pendirian Puskemas                                                           | - | - | - | -  | 1  | -  |
| 53 | Izin Toko Alat Kesehatan                                                          | - | - | - | -  | 1  | -  |
| 54 | Tanda Daftar Usaha Perjalanan Pariwisata                                          | - | - | - | -  | 1  | -  |
| 55 | Surat Pencabutan Izin Apoteker                                                    | - | - | - | -  | 4  | -  |
| 56 | Izin Praktik Elektromedis                                                         | - | - | - | -  | -  | 2  |
| 57 | Izin Paraktik Tenaga Kesehatan Tradisional                                        | - | - | - | -  | -  | 1  |
| 58 | Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga                                  | - | - | - | -  | -  | 45 |
| 59 | Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet                              | - | - | - | -  | -  | 1  |
| 60 | Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil | - | - | - | -  | -  | 1  |
| 61 | izin koperasi simpan pinjam                                                       | - | - | - | -  | -  | 3  |
| 62 | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal                                       | - | - | - | -  | -  | 79 |

|               |                                                       |              |              |              |              |              |              |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 63            | Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal | -            | -            | -            | -            | -            | 7            |
| 64            | Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal | -            | -            | -            | -            | -            | 1            |
| <b>JUMLAH</b> |                                                       | <b>3,794</b> | <b>4,124</b> | <b>4,990</b> | <b>3,738</b> | <b>2,424</b> | <b>3,234</b> |

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

**DAFTAR JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN  
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2021**

| NO                         | JENIS IZIN                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                                                                              |
| <b>1. SEKTOR KESEHATAN</b> |                                                                                                |
| 1                          | Izin Mendirikan Rumah Sakit                                                                    |
| 2                          | Izin Operasional Rumah Sakit                                                                   |
| 3                          | Izin Operasional Klinik                                                                        |
| 4                          | Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum                                                      |
| 5                          | Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)                                        |
| 6                          | Izin Apotik                                                                                    |
| 7                          | Izin Toko Obat                                                                                 |
| 8                          | Izin penyelenggaraan pengendalian Vektor dan Binatang pembawa Penyakit                         |
| 9                          | Izin Toko Alat Kesehatan                                                                       |
| 10                         | Izin Usaha Mikro Obat Tradisional                                                              |
| 11                         | Izin Perusahaan rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) |
| 12                         | Izin Penyelenggaraan Optikal                                                                   |
| 13                         | Izin unit Transfusi Darah                                                                      |
| 14                         | Izin Oprasional Ambulans                                                                       |
| 15                         | Izin Praktek Dokter                                                                            |
| 16                         | Izin Praktek Dokter Gigi                                                                       |
| 17                         | Izin Praktek Dokter Spesialis                                                                  |
| 18                         | Izin Paraktik Gigi Spesialis                                                                   |
| 19                         | Izin Praktik Dokter Internsip                                                                  |
| 20                         | Izin Praktik Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDGS)                                |
| 21                         | Izin Praktek Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Giagi Spesialis (PPDGS)             |



|    |                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Izin Praktik Dokter Peserta Program Pendidikan Dokter Kewenangan Tambahan |
| 23 | Izin Praktik Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan                       |
| 24 | Izin Kerja Perawat                                                        |
| 25 | Izin Praktik Perawat                                                      |
| 26 | Izin Praktik Bidan                                                        |
| 27 | Izin Praktik Apoteker                                                     |
| 28 | Izin Praktik Tenaga Tekhnis Kefarmasian                                   |
| 29 | Izin Praktek Tenaga Gizi                                                  |
| 30 | Izin Kerja Tenaga Gizi                                                    |
| 31 | Izin Kerja Tenaga Sanitarian                                              |
| 32 | Izin Praktik Fisioterafis                                                 |
| 33 | Izin Kerja Fisioterafis                                                   |
| 34 | Izin Praktik Okupasi Terapis                                              |
| 35 | Izin Kerja Okupasi Terapis                                                |
| 36 | Izin Kerja Trafis Wicara                                                  |
| 37 | Izin Praktik Trafis Wicara                                                |
| 38 | Izin Praktik Akupuntur Terapis                                            |
| 39 | Izin Kerja Refraksionis Optisien                                          |
| 40 | Izin Kerja Optometris                                                     |
| 41 | Izin Kerja Radiografer                                                    |
| 42 | Izin Kerja Ortotis Prostetis                                              |
| 43 | Izin Praktik Ortotis Prostetis                                            |
| 44 | Izin Praktik Ahli Teknologi laboratorium Medik                            |
| 45 | Izin Kerja Perekaman Medis                                                |
| 46 | Izin Praktik Elektromedis                                                 |
| 47 | Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler                                       |
| 48 | Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut                                       |
| 49 | Izin Praktik Penata Anestesi                                              |
| 50 | Izin Kerja Teknisi Gigi                                                   |
| 51 | Izin Penyelenggaraan Griya Sehat                                          |
| 52 | Izin Panti Sehat                                                          |
| 53 | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional                                      |
| 54 | Izin Paraktik Tenaga Kesehatan Tradisional                                |
| 55 | Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga                          |
| 56 | Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan                                        |
| 57 | Izin Tukang Gigi                                                          |

## 2. SEKTOR PARIWISATA

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Tanda Daftra Usaha Pariwisata |
|---|-------------------------------|

## 3. SEKTOR PERINDUSTRIAN

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Izin usaha Industri           |
| 2 | Tanda Daftar Industri         |
| 3 | Izin usaha Perluasan Industri |
| 4 | Izin Usaha Kawasan Industri   |

|                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                       | Izin Perluasan Kawasan Industri                                                   |
| <b>4. SEKTOR PERDAGANGAN</b>                            |                                                                                   |
| 1                                                       | Surat Izin Usaha Perdagangan                                                      |
| 2                                                       | Tanda Daftar Perusahaan                                                           |
| 3                                                       | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba                                                  |
| 4                                                       | Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi                                              |
| 5                                                       | Tanda Daftar Gudang                                                               |
| <b>5. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>      |                                                                                   |
| 1                                                       | Izin Mendirikan Bangunan                                                          |
| 2                                                       | Izin Usaha Jasa Konstruksi                                                        |
| 3                                                       | Izin Reklame                                                                      |
| <b>6. SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b> |                                                                                   |
| 1                                                       | Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                       |
| 2                                                       | Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman                               |
| <b>7. SEKTOR PERTANIAN</b>                              |                                                                                   |
| 1                                                       | Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet                              |
| 2                                                       | Izin Usaha Perkebunan                                                             |
| 3                                                       | Izin Usaha Peternakan                                                             |
| 4                                                       | Izin Usaha Obat Hewan                                                             |
| 5                                                       | Izin Usaha Tanaman Pangan                                                         |
| 6                                                       | Izin Usaha Hortikultura                                                           |
| 7                                                       | Izin Usaha Rumah Potong Hewan                                                     |
| 8                                                       | Izin Praktik Dokter Hewan                                                         |
| 9                                                       | Izin Praktik Paramedik Veteriner                                                  |
| 10                                                      | Izin Usaha Veteriner                                                              |
| 11                                                      | Izin Budi Daya Hewan Peliharaan                                                   |
| 12                                                      | Tanda Daftar Budi Daya Hewan Peliharaan                                           |
| <b>8. SEKTOR PERIKANAN</b>                              |                                                                                   |
| 1                                                       | Izin Usaha Perikanan                                                              |
| <b>9. SEKTOR PERTANAHAN</b>                             |                                                                                   |
| 1                                                       | Izin Lokasi                                                                       |
| <b>10. SEKTOR LINGKUNGAN</b>                            |                                                                                   |
| 1                                                       | Izin Lingkungan                                                                   |
| 2                                                       | Izin Pembuangan Air Limbah                                                        |
| 3                                                       | Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah untuk penghasil        |
| 4                                                       | Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil |
| <b>11. SEKTOR PERHUBUNGAN</b>                           |                                                                                   |
| 1                                                       | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang                                               |
| 2                                                       | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas                                     |
| 3                                                       | Izin Pelaraan Reklame                                                             |

|   |                        |
|---|------------------------|
| 4 | Izin Pelaran Keramaian |
| 5 | Izin Rayek             |

### 12. SEKTOR KOPERASI DAN UKM

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | izin koperasi simpan pinjam                                  |
| 2 | izin usaha mikro dan kecil                                   |
| 3 | izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam          |
| 4 | izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam |
| 5 | Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam             |
| 6 | izin unit simpan pinjam                                      |
| 7 | izin koperasi simpan Pinjam dan pembiayaan syariah           |
| 8 | Izin Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah               |

### 13. SEKTOR PENDIDIKAN

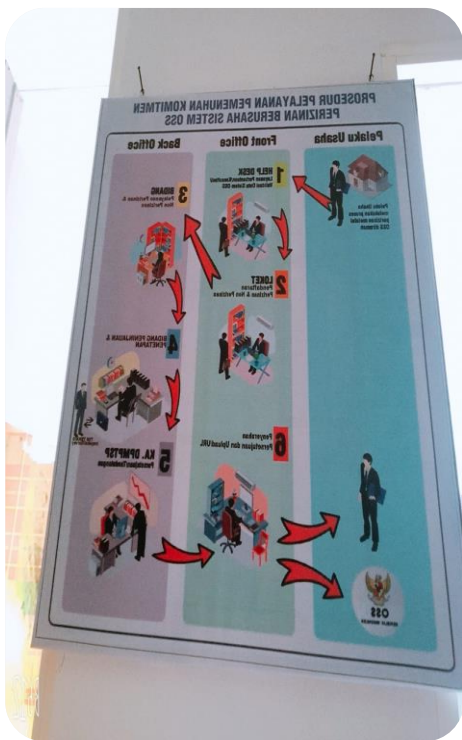
|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| 1 | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal           |
| 2 | Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal |
| 3 | Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Formal     |

### 14. SEKTOR KKETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | izin penelitian |
|---|-----------------|

### 15. SEKTOR PERIKANAN

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Izin Usaha Budidaya Ikan   |
| 2 | Izin Usaha Pengangkut Ikan |



Untuk mewujudkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas sangat didukung oleh adanya Standar dan Prosedur perizinan yang memadai sehingga dapat memberikan dampak pelayanan publik yang baik dalam hal pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.

Maksud dan tujuan ditetapkan standar pelayanan bidang perizinan dan non perizinan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras

dengan kemampuan penyelenggaraan sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Maksud dan Tujuan ditetapkan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai panduan bagi seluruh aparatur pada DPMPSTP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya serta menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas masing-masing aparatur.

Adapun data jenis perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar meliputi:

#### DATA JENIS IZIN YANG TELAH DITERBITKAN TAHUN 2021

| NO                         | JENIS IZIN                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <i>1</i>                   | <i>2</i>                                       |
| <b>A. SEKTOR KESEHATAN</b> |                                                |
| 1                          | Izin Operasional Klinik                        |
| 2                          | Izin Apotik                                    |
| 3                          | Izin Toko Obat                                 |
| 4                          | Izin Praktek Dokter                            |
| 5                          | Izin Praktik Perawat                           |
| 6                          | Izin Praktik Bidan                             |
| 7                          | Izin Praktik Apoteker                          |
| 8                          | Izin Praktik Tenaga Tekhnis Kefarmasian        |
| 9                          | Izin Praktek Tenaga Gizi                       |
| 10                         | Izin Praktik Fisioterafis                      |
| 11                         | Izin Kerja Radiografer                         |
| 12                         | Izin Praktik Ahli Teknologi laboratorium Medik |
| 13                         | Izin Praktik Elektromedis                      |
| 14                         | Izin Paraktik Tenaga Kesehatan Tradisional     |

|                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 15                                                      | Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga                                  |
| <b>B. SEKTOR PARIWISATA</b>                             |                                                                                   |
| 16                                                      | Tanda Daftra Usaha Pariwisata                                                     |
| <b>C. SEKTOR PERINDUSTRIAN</b>                          |                                                                                   |
| 17                                                      | Izin usaha Industri                                                               |
| 18                                                      | Tanda Daftar Industri                                                             |
| <b>D. SEKTOR PERDAGANGAN</b>                            |                                                                                   |
| 19                                                      | Surat Izin Usaha Perdagangan                                                      |
| 20                                                      | Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi                                              |
| 21                                                      | Tanda Daftar Gudang                                                               |
| <b>E. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>      |                                                                                   |
| 22                                                      | Izin Mendirikan Bangunan                                                          |
| 23                                                      | Izin Usaha Jasa Konstruksi                                                        |
| <b>F. SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b> |                                                                                   |
| -                                                       |                                                                                   |
| <b>G. SEKTOR PERTANIAN</b>                              |                                                                                   |
| 24                                                      | Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet                              |
| <b>H. SEKTOR PERIKANAN</b>                              |                                                                                   |
| -                                                       |                                                                                   |
| <b>I. SEKTOR PERTANAHAN</b>                             |                                                                                   |
| 25                                                      | Izin Lokasi                                                                       |
| <b>J. SEKTOR LINGKUNGAN</b>                             |                                                                                   |
| 26                                                      | Izin Lingkungan                                                                   |
| 27                                                      | Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil |
| <b>K. SEKTOR PERHUBUNGAN</b>                            |                                                                                   |
| -                                                       |                                                                                   |
| <b>L. SEKTOR KOPERASI DAN UKM</b>                       |                                                                                   |
| 28                                                      | izin koperasi simpan pinjam                                                       |
| <b>A. SEKTOR PENDIDIKAN</b>                             |                                                                                   |
| 29                                                      | - IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL                                     |
| 30                                                      | - IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON                                  |
| 31                                                      | - IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL                               |
| <b>B. SEKTOR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>        |                                                                                   |
| 32                                                      | - IZIN PENELITIAN                                                                 |
| <b>C. SEKTOR PERIKANAN</b>                              |                                                                                   |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Adapun alasan tercapainya target Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ini dikarenakan oleh :



Adanya Langkah-langkah strategi untuk meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dan  
Menjalankan maklumat pelayanan dengan baik;

Menjalankan PTSP sepenuhnya agar waktu pengeluaran izin sesuai dengan SOP;  
Menangani dan menindak lanjuti pengaduan / keluhan dari pengguna layanan perizinan

Untuk keberhasilan PTSP dalam menjawab isu nasional perizinan adalah mampu menerapkan dan mencapai ketentuan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan wujud komitmen pelayanan dengan publik.

Untuk standar pelayanan perizinan memuat :

1. Menetapkan lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan.
2. Menetapkan persyaratan permohonan.
3. Tenaga yang harus mengelola pelayanan.

Untuk standar operasional prosedur perizinan memuat :

Memberikan alur, tahapan dan proses waktu penyelesaian izin setiap pihak yang terlibat menyelesaikan izin.

Berdasarkan Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan juga didukung oleh Bidang Perizinan Lainnya yaitu Bidang Peninjauan dan Penetapan Perizinan dan Non Perizinan Sektor A dan B sehingga dengan Inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dapat memberikan

Pelayanan Publik untuk masyarakat pemohon izin di Kabupaten Polewali Mandar.

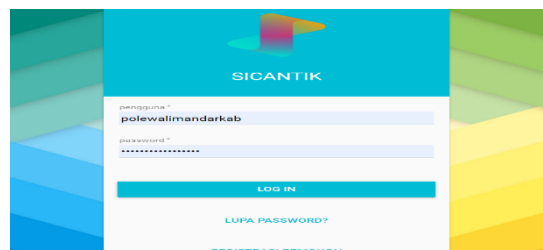


**Gambar 11 : Locket Pelayanan Perizinan Yang Terbagi Beberapa Sektor**

. Pelayanan Perizinan di Tahun 2021 memiliki inovasi kegiatan yang sangat membantu masyarakat umum dalam mempercepat pengurusan izin. Hal ini dapat dilihat dari inovasi kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan sebagai berikut :



1. Adanya APLIKASI Perizinan yaitu APLIKASI MASIGA (Mudah, Ramah, Pasti, Gampang) Berbasis Online. Dan Aplikasi OSS Kemudahan Berusaha dan Aplikasi Si Cantik Cloud





2. Pelayanan Penjemputan berkas Pemohon di 4 (Empat) Titik Penjemputan yaitu :

- **Kecamatan Polewali** : Meliputi Kecamatan Polewali, Anreapi, Binueang dan Matakali.
- **Kecamatan Wonomulyo** : Meliputi Kecamatan Wonomulyo, Tapango, Mapilli, Bulu dan Mapilli.
- **Kecamatan Campalagian** : Meliputi Kecamatan Campalagian, Tutar, dan Luyo.
- **Kecamatan Tinambung** : Meliputi Kecamatan Tinambung, Balanipa, Limboro dan Alu

Keterangan Untuk Pemohon di Kecamatan Polewali, Anreapi, Binueang dan Matakali, berkas izinnya yang sudah jadi itu diantar langsung kerumah Pemohon sedangkan untuk di Kecamatan lainnya izinnya diantar ke tempat titik penjemputan dan Pengantaran izin di Kecamatan Wonomulyo, Campalagian dan Tinambung.



Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, Di Tahun 2021 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Juga membuat terobosan INOVASI lainnya yaitu :



## INOVASI PERANGKAT DAERAH DAN PENGHARGAAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

| No. | Jenis Inovasi                                                                                                                                           | Gambaran Singkat Tentang Inovasi<br>(Dasar pelaksanaan, Tujuan, Manfaat dsb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p><b>Mall Pelayanan Publik Anjungan Izin Masagena (MPP AIM)</b></p>  |  <p>Guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dalam hal perizinan. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) meluncurkan suatu inovasi yang memudahkan masyarakat. Hadirnya Mall Pelayanan Publik Anjungan Izin Masagena (MPPAIM) di Kabupaten Polman.</p> <p>Inovasi kehadiran Mall Pelayanan Publik Anjungan Izin Masagena ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kantor dengan melakukan rehabilitasi sehingga DPMPPTSP kemudian dapat memberikan pelayanan dengan sarana dan prasarana seperti saat ini.</p> <p>Dengan adanya MPP AIM dalam pelaksanaannya untuk kualitas pelayanan publik sebagai salah satu wujud komitmen dan kesungguhan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Polewali Mandar maju sejahtera merupakan wujud kerja kita bersama.</p> <p>Kehadiran MPP AIM Ini juga merupakan kerja kolaboratif dan terintegrasi untuk kemudahan, kecepatan dan kepastian pelayanan bagi masyarakat. Dengan pengembangan layanan teknologi informasi melalui pemanfaatan Aplikasi OSS, MASIGA dan si CANTIK serta LAPOR yang mendukung Optimalnya pelayanan pada MPP AIM ini serta Memudahkan Masyarakat dalam mengurus Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</p> |

## DATA DUKUNG DOKUMENTASI INOVASI MALL PELAYANAN PUBLIK ANJUNGAN IZIN MASAGENA ( MPP AIM )





Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar





## LAYANAN TASPEN DI MPP AIM



Dengan adanya inovasi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap selalu berupaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun Strategi dalam upaya peningkatan pelayanan tersebut yaitu ;

1. Membuat regulasi teknis pelaksanaan pelayanan perizinan terutama pengelolaan izin-izin strategis untuk mempercepat proses layanan dan akurasi pengendalian sektoral.
2. Menerapkan pola online sistem dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat untuk mendorong penanam modal mengajukan perizinan secara online.
3. Meningkatkan kapasitas aparaturnya PTSP dalam melayani masyarakat sebagai upaya pendorong penguatan kelembagaan dan sumberdaya manusia Dinas PMPTSP.



**Gambar 12 :** Kegiatan Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

4. Meningkatkan sinegritas dengan perangkat daerah teknis sehingga dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan perizinan.



**Gambar 13 :** Kegiatan Proses Penerimaan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar



Untuk meningkatkan pengawasan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar serta berdasarkan SOP dan SP maka didalam pelaksanaannya itu telah melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap izin yang dianggap bermasalah dan tidak memiliki izin.





**Gambar 14 :** Kegiatan Tim Teknis Perizinan dalam Peninjauan dan Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan



Untuk mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan izin dan non izin maka sangat diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan izin pada masyarakat. Maksud dari adanya Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan adalah untuk mewujudkan tata laksana perizinan yang mudah, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tujuan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan perizinan dan non perizinan adalah untuk :

- a. Mengetahui data dan informasi sejauh mana tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memiliki perizinan pada saat melaksanakan setiap kegiatan investasi dilapangan.
- b. Memperoleh data dan informasi kesesuaian antara perencanaan, permohonan izin yang diajukan dengan pelaksana dilapangan.
- c. Membantu pemecahan masalah secara terpadu dalam menyelesaikan setiap mudah dan hambatan dilapangan.

Dalam memberikan upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan izin dan non izin yang diterbitkan, maka tata cara dalam memberikan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi dan pemilahan data dan berkas permohonan izin yang akan menjadi objek pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan.

- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian melalui inspeksi kelengkapan guna melakukan pendataan pelanggaran dari potensi obyek perizinan dilapangan secara berkala.
- c. Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh pengusaha dan masyarakat.
- d. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan dan informasi tentang penyimpangan pelaksana investasi oleh perusahaan serta melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan dari perizina dan non perizinan.

Dari hasil pengawasan dan pengendalian ini akan memberikan dampak bagi peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan izin dan non izin sehingga dapat memberikan hasil laporan cakupan kepatuhan masyarakat dalam penyelenggaraan izin dan non izin yang dilaksanakan.



### 3.1.4. **Capaian Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Organisasi Perangkat Daerah**

Pada Capaian Sasaran ini dimaksudkan adalah untuk mengetahui ukuran meningkatnya kualitas manajemen organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar melakukan berbagai upaya dengan melaksanakan Program dan beberapa Kegiatan Prioritas yang telah ditetapkan untuk mencapai indikator kinerja dari sasaran guna Meningkatkan kualitas manajemen organisasi perangkat daerah. Pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu mencoba mengukur capaian kinerja untuk semua kegiatan program yang merupakan belanja operasional dan Pemeliharaan serta belanja modal yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar.

#### 1.1.4.1

### Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder



Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Manajemen Organisasi Perangkat Daerah terdapat Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder Dimana, pada Indikator ini kita dapat mengetahui Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder Yang di peroleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis ini , maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam pencapaiannya diperlukan sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan yang telah dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat, yaitu Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan perekatoran dan layanan perizinan dan non perizinan.

Adapun capaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Tabel 27 :**  
**Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021**

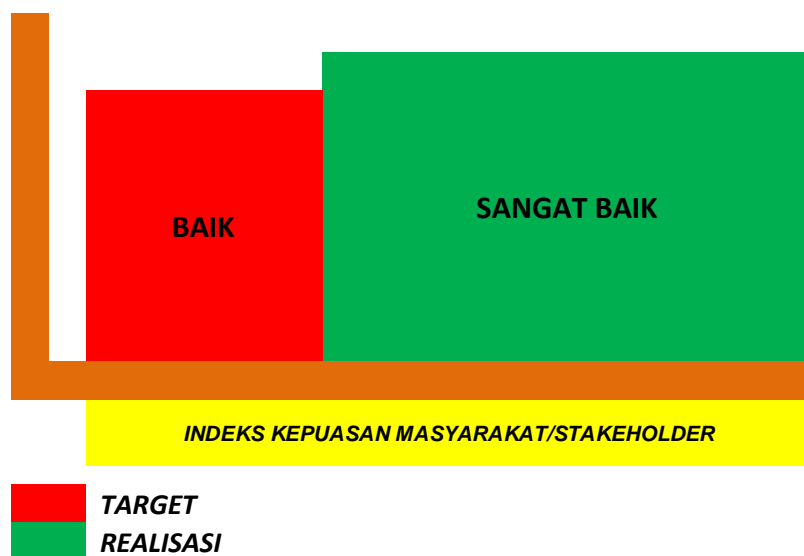
| No.                       | Unsur Pelayanan                        | Nilai Rata-Rata |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| U1                        | Persyaratan                            | 3,88            |
| U2                        | Sistim Mekanisme dan Prosedur          | 3,87            |
| U3                        | Waktu Penyelesaian                     | 3,87            |
| U4                        | Biaya Tarif                            | 3,89            |
| U5                        | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan     | 3,87            |
| U6                        | Kompetensi Pelaksana                   | 3,88            |
| U7                        | Perilaku Pelaksana                     | 3,88            |
| U8                        | Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan | 3,87            |
| U9                        | Sarana dan Prasarana                   | 3,87            |
| <b>IKM UNIT PELAYAAAN</b> |                                        | <b>96,96</b>    |

| MUTU PELAYANAN           |               |               |             |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Predikat Kinerja Layanan |               |               |             |
| Tidak Baik               | Kurang Baik   | Baik          | Sangat Baik |
| 25,00 – 64,99            | 65,00 – 76,60 | 76,61 – 88,30 | 88,31 – 100 |

Berdasarkan Tabel diatas diatas target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar itu telah mencapai target dan capaian ini melebihi target yang dicanangkan. Ini dapat diraih dari adanya dukungan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Adapun Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mendukung indicator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder yaitu Dari Kegiatan yang ada di Sekretariat dan Kegiatan dari Bidang Lingkup DPMPTSP.

**Gambar :** Diagram Batang Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder Pada Dinas PMPTSP Tahun 2021.

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**



Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder itu BAIKA. Target tersebut dapat



dicapai sesuai target pada tahun 2021 dan melebihi target. Ini menandakan adanya capaian target yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Untuk Data capaian Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun 2018 s/d Tahun 2021 dapat di sajikan datanya sebagai berikut :

**Tabel 28 : Data Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Dari Tahun 2019 s/d Tahun 2021**

| No. | Indikator Kinerja                        | Tahun |      |             |
|-----|------------------------------------------|-------|------|-------------|
|     |                                          | 2019  | 2020 | 2021        |
| 1   | Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder | BAIK  | BAIK | SANGAT BAIK |

Berdasarkan table diatas, Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar berhasil mencapai capaian yang meningkat Capaiannya dari tahun ke tahun sehingga hasil evaluasi ini dapat memberikan penerapan manajemen kinerja perkantoran yang terukur dan terencana sesuai target yang di inginkan.

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                           | Target             | Realisasi          | Persentase Capaian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                                         | Rp.                | Rp.                | %                  |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>                    |                    |                    |                    |
|     | <b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Daerah Perangkat Daerah</b>                      | <b>34,322,100</b>  | <b>34,274,000</b>  | <b>99.86</b>       |
|     | <b>Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>            | 24,998,100         | 24,950,000         | 99.81              |
|     | <b>Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>     | 9,324,000          | 9,324,000          | 100.00             |
|     |                                                                                         |                    |                    |                    |
|     | <b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>215,106,550</b> | <b>214,955,550</b> | <b>99.93</b>       |
|     | <b>Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor</b> | 1,200,000          | 1,200,000          | 100.00             |
|     | <b>Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>                                  | 26,180,000         | 26,150,000         | 99.89              |
|     | <b>Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>                           | 30,001,600         | 29,997,600         | 99.99              |
|     | <b>Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>          | 7,080,000          | 7,080,000          | 100.00             |
|     | <b>Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material</b>                                         | 40,095,950         | 40,094,250         | 100.00             |
|     | <b>Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>              | 110,549,000        | 110,433,700        | 99.90              |
|     |                                                                                         |                    |                    |                    |
|     | <b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>163,853,950</b> | <b>163,323,200</b> | <b>99.68</b>       |
|     | <b>Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana</b>                                    | 163,853,950        | 163,323,200        | 99.68              |



|  |                                                                                                                                       |                    |                    |              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|  | Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                         |                    |                    |              |
|  | <b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>45,579,000</b>  | <b>45,575,250</b>  | <b>99.99</b> |
|  | <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 7,875,000          | 7,872,000          | 99.96        |
|  | <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 6,204,000          | 6,203,250          | 99.99        |
|  | <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 31,500,000         | 31,500,000         | 100.00       |
|  |                                                                                                                                       |                    |                    |              |
|  | <b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>105,838,400</b> | <b>105,675,000</b> | <b>99.85</b> |
|  | <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 40,775,000         | 40,775,000         | 100.00       |
|  | <b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | 52,063,400         | 51,900,000         | 99.69        |
|  | <b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | 13,000,000         | 13,000,000         | 100.00       |
|  | <b>n</b>                                                                                                                              |                    |                    |              |

Berdasarkan tabel diatas, Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 1 Program 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan.

**ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

Berdasarkan target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder pada Dinas PMPTSP untuk tahun 2021 yang mencapai target dari target yang diberikan, dimana dalam pencapaian indikator ini didukung oleh Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang dilaksanakan dan memberikan hasil pencapaian yang telah diinginkan

Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder "BAIK". Dimana Target ini Realisasinya sampai akhir tahun 2021 mencapai Predikat "SANGAT BAIK", sehingga capaian kinerja dari indikator kinerja nilai realisasi 100 persen. Ini menandakan adanya Persentase kenaikan dari tahun sebelumnya. Adapun factor yang sangat mendukung keberhasilan indicator kinerja ini yaitu :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki Dokumen Kepegawaian
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana untuk kegiatankantor
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah Menyediakan Ketatausahaan Kantor yang sesuai standar dan prosedur
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan Menyediakan Penunjang Kegiatan Kantor
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah menyediakan Pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan Gedung kantor

Dengan demikian realisasi target **INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / STAKEHOLDER** dapat mencapai target dan sekaligus mencapai capaian yang diharapkan tersebut dengan demikian target indicator ini dikategorikan **BERHASIL**

### ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA YANG DILAKUKAN

indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder sangat didukung oleh Sasaran Strategis / Kinerja Utama disertai Anggaran di Bagian Sekretariat DPMPSTSP. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Efisiensi Sumber Daya yang dilakukan di beberapa kegiatan. Adapun Analisis sumber daya yang dilakukan pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 29

#### ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA YANG DILAKUKAN PADA INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT/STAKEHOLDER

| No. | Sasaran Strategis / Kinerja Utama                                     | Anggaran    | Realisasi   | Persentase |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|     |                                                                       | Tahun 2021  | Anggaran    | Capaian    |
|     |                                                                       | Rp.         | Rp.         | %          |
|     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 34,322,100  | 34,274,000  | 99.86      |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 215,106,550 | 214,955,550 | 99.93      |
|     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 163,853,950 | 163,323,200 | 99.68      |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 45,579,000  | 45,575,250  | 99.99      |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 105,838,400 | 105,675,000 | 99.85      |

**ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG  
KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar sangat didukung oleh Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan di Bagian Sekretariat. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Program dan Kegiatan Penunjang keberhasilan pencapaian Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat/Stakeholder Dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel. 30**

| ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT/STAKEHOLDER TAHUN 2021 |                                                                |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Jabatan                                                                                                                             | Kinerja Utama                                                  | Indikator Kinerja | Program / Kegiatan                                                                                          | Target                                                                                                                                                                                                                       | Realisasi  | % Capaian  |        |
| Sekretaris                                                                                                                          | Meningkatnya Kualitas Manajemen Organisasi Perangkat Daerah    | 1                 | Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                           | <b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><b>Kegiatan</b> Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah                                                                                                              | 100%       | 100%       | 100%   |
|                                                                                                                                     |                                                                | 2                 | Persentase pemenuhan standar kompetensi ASN pada jabatannya                                                 | <b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                   | 100%       | 100%       | 100%   |
|                                                                                                                                     |                                                                | 3                 | Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                  | <b>Sub Kegiatan</b> Pendidikan Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                  | 100%       | 100%       | 100%   |
|                                                                                                                                     |                                                                | 4                 | Persentase Pemenuhan Bahan Logistik Kantor                                                                  | <b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah<br><b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan                                                                                                   | 100%       | 99.89      | 99.89  |
|                                                                                                                                     |                                                                | 5                 | Persentase Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan                                                           | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                         | 100%       | 99.99      | 99.99  |
|                                                                                                                                     |                                                                |                   | Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                          | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                  | 100%       | 100.00     | 100.00 |
|                                                                                                                                     |                                                                |                   | Persentase Pemenuhan Bahan/Material                                                                         | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                | 100%       | 100.00     | 100.00 |
|                                                                                                                                     |                                                                |                   | Persentase Pemenuhan Operasional Perjalanan Dinas Luar Daerah                                               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD<br><b>Kegiatan</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                       | 100%       | 99.90      | 99.90  |
|                                                                                                                                     |                                                                |                   | Persentase Pemenuhan Keperluan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor                                 | <b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                             | 100%       | 100%       | 99.68  |
|                                                                                                                                     |                                                                |                   | Persentase Pemenuhan Jasa Surat Menyurat                                                                    | <b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                   | 100%       | 99.96      | 99.96  |
|                                                                                                                                     |                                                                |                   | Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi Internet                                                               | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                  | 100%       | 99.99      | 99.99  |
|                                                                                                                                     |                                                                |                   | Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                             | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                    | 100%       | 100.00     | 100.00 |
|                                                                                                                                     |                                                                |                   | Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | <b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100%       | 100%       | 100%   |
|                                                                                                                                     |                                                                |                   | Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor                                                          | <b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                             | 100%       | 99.69      | 99.69  |
|                                                                                                                                     |                                                                |                   | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor                           | <b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                       | 100%       | 100%       | 100%   |
| Kasubag. Umum dan Kepegawain                                                                                                        | Meningkatnya kualitas Tertib Administrasi Ketatausahaan Kantor | 1                 | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | 50 Buah    | 50 Buah    | 100%   |
|                                                                                                                                     |                                                                | 2                 | Jumlah Pelatihan/Workshop bagi Aparatur                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | 1 Orang    | 1 Orang    | 100%   |
|                                                                                                                                     |                                                                | 3                 | Jumlah Jenis komponen listrik/penerangan yang disediakan                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | 2 Jenis    | 2 Jenis    | 100%   |
|                                                                                                                                     |                                                                | 4                 | Jumlah dan Jenis makanan yang disediakan                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | 4 Jenis    | 4 Jenis    | 99.89  |
|                                                                                                                                     |                                                                | 5                 | Jumlah dan Jenis barang cetakan dan penggandaan                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | 5 Jenis    | 5 Jenis    | 99.99  |
|                                                                                                                                     |                                                                | 6                 | Jumlah dan Jenis Bahan bacaan                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | 2 Jenis    | 2 Jenis    | 100.00 |
|                                                                                                                                     |                                                                | 7                 | Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang di sediakan                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | 34 Jenis   | 34 Jenis   | 100.00 |
|                                                                                                                                     |                                                                | 8                 | Jumlah SPPD hasil perjalanan dinas keluar daerah                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | 47 Dokumen | 47 Dokumen | 99.90  |
|                                                                                                                                     |                                                                | 9                 | Jumlah jenis Perlengkapan kantor yang diadakan                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | 9 Jenis    | 9 Jenis    | 99.68  |
|                                                                                                                                     |                                                                | 10                | Jumlah surat yang terkirim                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | 3200 Surat | 3200 Surat | 99.96  |
|                                                                                                                                     |                                                                | 11                | Jumlah Jenis rekening yang dibayarkan                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | 1 Jenis    | 1 Jenis    | 99.99  |
|                                                                                                                                     |                                                                | 12                | Jumlah jenis dan jasa kebersihan                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | 3 Orang    | 3 Orang    | 100.00 |
|                                                                                                                                     |                                                                | 13                | Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara                                                |                                                                                                                                                                                                                              | 10 Unit    | 10 Unit    | 1.00   |
|                                                                                                                                     |                                                                | 14                | Jumlah Jenis gedung yang dipelihara                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | 7 Jenis    | 7 Jenis    | 99.69  |
|                                                                                                                                     |                                                                | 15                | Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | 3 Jenis    | 3 Jenis    | 1.00   |



### 1.1.4.2 Predikat SAKIP Perangkat Daerah



Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Manajemen Organisasi Perangkat Daerah terdapat Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Dimana, pada Indikator ini kita dapat mengetahui Predikat SAKIP Yang di peroleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun ke Tahun yang Evaluasi lewat Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD dari Inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Hasil evaluasi Perhitungan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar, itu memuat Aspek komponen yang dinilai adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal
5. Capaian Kinerja

berikut ini Data Evaluasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar yang rincian hasil penilaian untuk Data Tahun 2021 berdasarkan REVIU Penilaian LAKIP DPMPSTP dari Inspektorat untuk Tahun 2020 serta

Adapun Metode Perhitungan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dapat diketahui dari **Bobot dan Nilai Yang dihasilkan oleh Komponen SAKIP yang dinilai.** adalah sebagai berikut

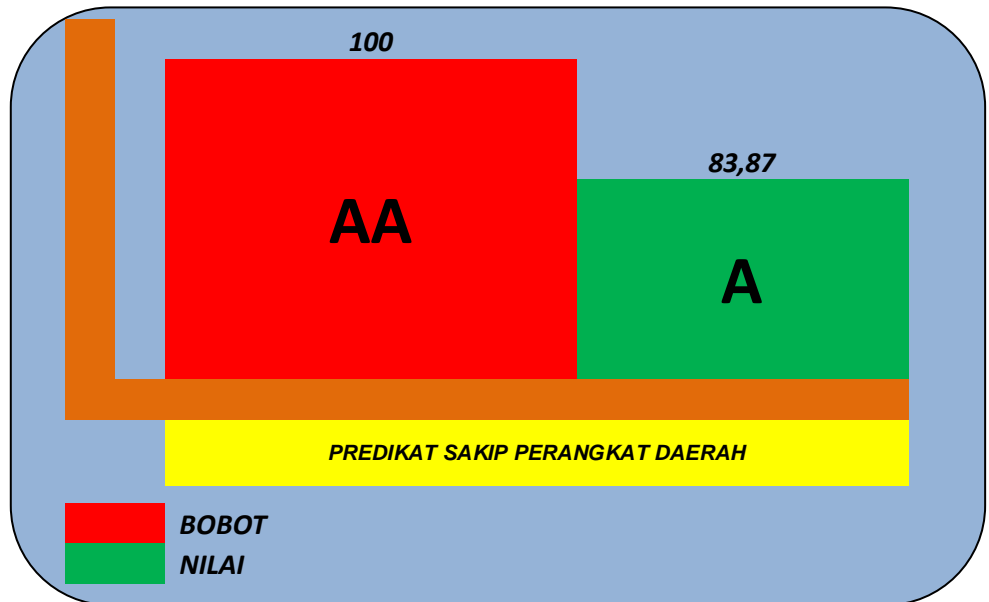
**Tabel 35 : Data Indikator Predikat SAKIP Perangkat Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021**

| No. | Komponen yang dinilai                | 2021       |              |
|-----|--------------------------------------|------------|--------------|
|     |                                      | Bobot      | Nilai        |
| 1   | Perencanaan Kinerja                  | 30         | 29,40        |
| 2   | Pengukuran Kinerja                   | 25         | 22,82        |
| 3   | Pelaporan Kinerja                    | 15         | 12,31        |
| 4   | Evaluasi Internal                    | 10         | 5,38         |
| 5   | Capaian Kinerja                      | 20         | 13,96        |
|     | <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>          | <b>100</b> | <b>83,87</b> |
|     | <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b> |            | <b>A</b>     |

Berdasarkan Tabel diatas diatas target indikator kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar itu telah mencapai target dan capaian ini dapat diraih dari adanya dukungan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Adapun Kegiatan yang mendukung indicator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah yaitu Kegiatan Penyusunan RENJA/Perubahan Renja Perangkat Daerah, Kegiatan Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA dan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD.

**Gambar 16 :** Diagram Batang Perbandingan Antara Bobot dan Nilai pada Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Pada Dinas PMPTSP Tahun 2021.

***Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021***



Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menargetkan Predikat SAKIP Perangkat Daerah A. Target tersebut dapat dicapai sesuai target pada tahun 2021. Ini menandakan adanya capaian target yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Untuk Data capaian predikat SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun 2017 s/d Tahun 2021 dapat di sajikan datanya sebagai berikut :

**Tabel 32 : Data Indikator Predikat SAKIP Perangkat Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Dari Tahun 2019 s/d Tahun 2021**

| No. | Komponen yang dinilai | 2019  |       | 2020  |       | 2021  |       |
|-----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                       | Bobot | Nilai | Bobot | Nilai | Bobot | Nilai |
| 1   | Perencanaan Kinerja   | 30    | 28,20 | 30    | 29,40 | 30    | 29,40 |
| 2   | Pengukuran Kinerja    | 25    | 23,75 | 25    | 22,19 | 25    | 22,82 |
| 3   | Pelaporan Kinerja     | 15    | 12,27 | 15    | 12,13 | 15    | 12,31 |

|   |                                      |            |              |            |              |            |              |
|---|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 4 | Evaluasi Internal                    | 10         | 3,45         | 10         | 5,20         | 10         | 5,38         |
| 5 | Capaian Kinerja                      | 20         | 12,50        | 20         | 13,00        | 20         | 13,96        |
|   | <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>          | <b>100</b> | <b>80,77</b> | <b>100</b> | <b>81,92</b> | <b>100</b> | <b>83,87</b> |
|   | <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b> |            | <b>A</b>     |            | <b>A</b>     |            | <b>A</b>     |



Berdasarkan table diatas, Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar berhasil mencapai capaian yang meningkat persentasenya dari tahun ke tahun sehingga hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP ini dapat memberikan penerapan

manajemen kinerja yang terukur dan terencana sesuai target yang di inginkan.

Indikator kinerja Predikat SAKIP pada Perangkat Daerah telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator Predikat SAKIP Perangka Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

**Tabel 33 : Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Penunjang Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas PMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021**

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                      | Target            | Realisasi         | Persentase Capaian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|     |                                                                                    | Rp.               | Rp.               | %                  |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>               |                   |                   |                    |
|     | <b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>11,000,000</b> | <b>10,999,700</b> | <b>100</b>         |
|     | <b>Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>              | 4,000,000         | 4,000,000         | 100                |
|     | <b>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>                   | 5,000,000         | 5,000,000         | 100                |
|     | <b>Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                            | 2,000,000         | 1,999,700         | 99.99              |

Berdasarkan tabel diatas, Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 1 Program 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.

### **ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

Berdasarkan target indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas PMPTSP untuk tahun 2020 yang mencapai target dari target yang diberikan, dimana dalam pencapaian indikator ini didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Kegiatan Penyusunan RENJA/Perubahan Renja Perangkat Daerah kemudian kegiatan Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA dan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD.



Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menargetkan Predikat SAKIP Perangkat Daerah "A". Dimana Target ini Realisasinya sampai akhir tahun 2021 mencapai Predikat "A", sehingga capaian kinerja dari indikator kinerja nilai realisasi 100 persen. Ini menandakan adanya Persentase kenaikan dari tahun sebelumnya. Adapun factor yang sangat mendukung keberhasilan indicator kinerja ini yaitu :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki Dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta Perjanjian Kinerja (PK).
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat OPD hingga pejabat eselon IV.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan Evaluasi Internal untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Data target output dan outcome dalam pencapaian strategi dan tujuan serta sasaran program dan kegiatan

Dengan demikian realisasi target **PREDIKAT SAKIP PERANGKAT DAERAH** dapat mencapai target dan sekaligus mencapai capaian yang diharapkan tersebut dengan demikian target indicator ini dikategorikan **BERHASIL**

**ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA YANG DILAKUKAN**

indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah sangat didukung oleh Sasaran Strategis / Kinerja Utama disertai Anggaran di Bagian Sekretariat DPMPTSP. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Efisiensi Sumber Daya yang dilakukan di Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan. Adapun Analisis sumber daya yang dilakukan pada Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 34

**ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA YANG DILAKUKAN  
PADA INDIKATOR PREDIKAT SAKIP PERANGKAT DAERAH**

| No. | Sasaran Strategis / Kinerja Utama                                | Anggaran   | Realisasi  | Persentase |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|     |                                                                  | Tahun 2021 | Anggaran   | Capaian    |
|     |                                                                  | Rp.        | Rp.        | %          |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11,000,000 | 10,999,700 | 100        |

**ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG  
KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar sangat didukung oleh Program dan Kegiatan di Bagian Sekretariat. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Program dan Kegiatan Penunjang keberhasilan pencapaian Kinerja Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 35

| ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA<br>PREDIKAT SAKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 |                                                                                                 |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |           |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| Jabatan                                                                                                                         | Kinerja Utama                                                                                   | Indikator Kinerja | Program / Kegiatan                                                                               | Target                                                                                                                                                                                                         | Realisasi | % Capaian |      |
| Sekretaris                                                                                                                      | Meningkatnya Kualitas Manajemen Organisasi Perangkat Daerah                                     | 1                 | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | <b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><b>Kegiatan</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100%      | 100%      | 100% |
|                                                                                                                                 |                                                                                                 | 2                 | Persentase Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                           | <b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                            | 100%      | 100%      | 100% |
|                                                                                                                                 |                                                                                                 | 3                 | Persentase Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | <b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                            | 100%      | 100%      | 100% |
|                                                                                                                                 |                                                                                                 | 4                 | Persentase Pemenuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | <b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br><b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | 100%      | 98%       | 98%  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                 | 5                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      | <b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                | 100%      | 100%      | 100% |
|                                                                                                                                 |                                                                                                 | 6                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD                   | <b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD                                                                                                          | 100%      | 100%      | 100% |
| Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan                                                                                              | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1                 | Jumlah Dokumen Renstra / Perubahan Renstra yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu          | <b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><b>Kegiatan</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
|                                                                                                                                 |                                                                                                 | 2                 | Jumlah Dokumen program dan kegiatan dan perencanaan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | <b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                            | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% |
|                                                                                                                                 |                                                                                                 | 3                 | Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu                             | <b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah                                                                                                                                                      | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| Kasubag. Keuangan dan Verifikasi dan Pelaporan                                                                                  | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1                 | Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya                                                 | <b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                  | 25 ASN    | 25 ASN    | 100% |
|                                                                                                                                 |                                                                                                 | 2                 | Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu         | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br><b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                       | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
|                                                                                                                                 |                                                                                                 | 3                 | Jumlah Dokumen Laporan keuangan Bulanan/ Semesteran yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | <b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD                                                                                                          | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% |

### 1.1.4.3 Opini Pengelolaan Keuangan

Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Manajemen Organisasi Perangkat Daerah terdapat Indikator Opini Pengelolaan



Keuangan. Dimana, pada Indikator ini kita dapat mengetahui Opini Pengelolaan Keuangan Yang di peroleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun ke Tahun lewat Laporan Hasil Evaluasi Laporan Keuangan OPD.

Sehubungan dengan itu ada 3 (Tiga) jenis kewenangan yang menjadi sasaran untuk mencapai Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), adapun kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Pemeriksaan Keuangan**, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat daerah, pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. **Pemeriksaan Kinerja**, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan Negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemerisaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan

dengan keuangan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif.

- 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu** adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang yang menjadi sasaran atau obyek tertentu pemeriksaan.

Menindaklanjuti hasil Rekomendasi dalam upaya peningkatan pencapaian kinerja penyelenggaraan tertib administarsi pengelolaan Keuangan di OPD diperlukan adanya kewajara informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang disajikan dalam empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern..

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opinin audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dan terukur. Jika laporan keuangan diberikan opini ini artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Faktor-faktor pendukung Indikator Kinerja Opini Pengelolaan Keuangan dalam mencapai Indikator Sasaran Opini WTP antara lain :

1. Komitmen Pimpinan untuk mecapai terwujudnya Opni WTP dengan melaksanakan evaluasi dan pengawasan secara berjenjang.
2. Adanya kebijakan Akuntansi yang diterapkan secara berkesinambungan.
3. Adanya Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan yang dilaksanakan.

Untuk pengelolaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2021,



laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Sitem Pengendalian Intrn dengan menyajikan informasi pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk Laporan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar memuat 5 (lima) komponen utama yaitu :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berikut ini Data pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan WTP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar yang Data Tahun 2021 berdasarkan Metode Penyelesaian Laporan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dapat diketahui sebagai berikut

**Tabel 36 : Data Indikator Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021**

| No. | Opini yang dinilai         | 2021   |           |
|-----|----------------------------|--------|-----------|
|     |                            | Target | Realisasi |
| 1   | Opini Pengelolaan Keuangan | WTP    | WTP       |

Berdasarkan Tabel diatas diatas target indikator kinerja Opini Pengelolaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar itu telah mencapai target dan capaian ini dapat diraih dari adanya dukungan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja Opini Pengelolaan Keuangan yaitu Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang didukung oleh 3 Sub

Kegiatan yaitu : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

**Gambar 17 :** Diagram Batang Perbandingan Target dan Realisasi pada Indikator Kinerja Opini Pengelolaan Keuangan Pada Dinas PMPTSP Tahun 2021.



Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menargetkan Opini Pengelolaan Keuangan WTP. Target tersebut dapat dicapai sesuai target pada tahun 2021. Ini menandakan adanya capaian target

Untuk Data capaian Target Opini Pengelolaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun 2019 s/d Tahun 2020 dapat di sajikan datanya sebagai berikut :

**Tabel 37 :** Data Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 s/d 2021

| No. | Opini yang dinilai | 2019   |           | 2020   |           | 2021   |           |
|-----|--------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|     |                    | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1   | Opini Pengelolaan  | WTP    | WTP       | WTP    | WTP       | WTP    | WTP       |

|  |          |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|
|  | Keuangan |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|

Berdasarkan table diatas, Opini Pengelolaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar berhasil mencapai capaian yang sama dengan tahun sebelumnya sehingga memberikan hasil pengelolaan keuangan yang tertib administrasi sesuai standard dan tepat waktu.

Adapun Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator Opini Pengelolaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

**Tabel 38 : Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Penunjang Indikator Opini Pengelolaan Keuangan pada Dinas PMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021.**

| NO.      | PROGRAM / KEGIATAN                                                                | TARGET        | REALISASI     | %      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|          |                                                                                   | Rp.           | Rp.           |        |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                               |               |               |        |
| 1        | <b>KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                          | 2,307,796,591 | 2,273,739,285 | 98.52  |
| 1        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | 2,302,796,591 | 2,268,739,285 | 98.52  |
| 2        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | 3,000,000     | 3,000,000     | 100.00 |
| 3        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 2,000,000     | 2,000,000     | 100.00 |

Berdasarkan tabel diatas, Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator Opini Pengelolaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 1 Program1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.

### ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Berdasarkan target indikator kinerja Opini Pengelolaan Keuangan pada Dinas PMPTSP untuk tahun 2021 yang mencapai target dari target yang diberikan, dimana dalam pencapaian indikator ini didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Berkala ( Bulanan, Triwulan dan Semesteran ) dan kegiatan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun

Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menargetkan Opini Pengelolaan Keuangan “WTP”. Dimana Target ini Realisasinya sampai akhir tahun 2020 mencapai Predikat “WTP” Sesuai dengan sistematisa administrasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan, sehingga capaian kinerja dari indikator kinerja 100 persen. Ini menandakan adanya Persentase yang berhasil dari tahun sebelumnya. Adapun faktor yang sangat mendukung keberhasilan indikator kinerja ini yaitu :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), Laporan Monitoring dan Evaluasi Anggaran (Monev Anggaran), Laporan Aset Barang
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan Evaluasi Internal untuk memantau Pegawai pencapaian Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan..

Dengan demikian realisasi target **OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN** dapat mencapai target dan sekaligus mencapai capaian yang diharapkan tersebut dengan demikian target indikator ini dikategorikan **BERHASIL**

## ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA YANG DILAKUKAN

indikator kinerja Opini Pengelolaan Keuangan sangat didukung oleh Sasaran Strategis / Kinerja Utama disertai Anggaran di Bagian Sekretariat DPMPTSP. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Efisiensi Sumber Daya yang dilakukan di Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun Analisis sumber daya yang dilakukan pada Indikator Opini Pengelolaan Keuangan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel. 39**

**ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA YANG DILAKUKAN  
PADA INDIKATOR OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN**

| No. | Sasaran Strategis /<br>Kinerja Utama      | Anggaran<br>Tahun 2020 | Realisasi<br>Anggaran | Persentase |
|-----|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 1   | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah | 2,307,796,591          | 2,273,739,285         | 98.52      |

**ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG  
KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

indikator kinerja Opini Pengelolaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar sangat didukung oleh Program dan Kegiatan di Bagian Sekretariat. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Program dan Kegiatan Penunjang keberhasilan pencapaian Kinerja Indikator Opini Pengelolaan Keuangan Dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel. 40

**ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2021**

| Jabatan                                        | Kinerja Utama                                                                                   | Indikator Kinerja | Program / Kegiatan                                                                               | Target                                                                                                                                                                                                         | Realisasi | % Capaian |      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| Sekretaris                                     | Meningkatnya Kualitas Manajemen Organisasi Perangkat Daerah                                     | 1                 | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | <b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><b>Kegiatan</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100%      | 100%      | 100% |
|                                                |                                                                                                 | 2                 | Persentase Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                           | <b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                            | 100%      | 100%      | 100% |
|                                                |                                                                                                 | 3                 | Persentase Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | <b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                            | 100%      | 100%      | 100% |
|                                                |                                                                                                 | 4                 | Persentase Pemenuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | <b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br><b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | 100%      | 98%       | 98%  |
|                                                |                                                                                                 | 5                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      | <b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                | 100%      | 100%      | 100% |
|                                                |                                                                                                 | 6                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD                   | <b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD                                                                                                          | 100%      | 100%      | 100% |
| Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan             | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1                 | Jumlah Dokumen Renstra / Perubahan Renstra yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu          | <b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><b>Kegiatan</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
|                                                |                                                                                                 | 2                 | Jumlah Dokumen program dan kegiatan dan perencanaan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | <b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                            | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% |
|                                                |                                                                                                 | 3                 | Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu                             | <b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                            | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| Kasubag. Keuangan dan Verifikasi dan Pelaporan | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1                 | Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan                                                    | <b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                  | 25 ASN    | 25 ASN    | 100% |
|                                                |                                                                                                 | 2                 | Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu         | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br><b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                       | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
|                                                |                                                                                                 | 3                 | Jumlah Dokumen Laporan keuangan Bulanan/ Semesteran yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | <b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD                                                                                                          | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% |

## 3.2 Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2021 Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar secara fisik terealisasi 98,38% sedangkan keuangan sebagian besar teralisasi 98,38%. Anggaran ini dipergunakan untuk mendukung terealisasinya indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2019 – Tahun 2024.

Berikut ini adalah Program dan Kegiatan Tahun 2021 yang dilaksanakan untuk mencapai indikator serta perbandingan realisasi dan target sesuai dengan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.

| NO | URAIAN PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021 |                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| I  | PROGRAM                                               | <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                                       |
| 1  | Kegiatan                                              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>           |
|    | Sub Kegiatan                                          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |
|    | Sub Kegiatan                                          | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                        |
|    | Sub Kegiatan                                          | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 |
| 2  | Kegiatan                                              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                     |
|    | Sub Kegiatan                                          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 |
|    | Sub Kegiatan                                          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       |
|    | Sub Kegiatan                                          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD |
| 3  | Kegiatan                                              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                  |
| 1  | Sub Kegiatan                                          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                            |
| 2  | Sub Kegiatan                                          | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                     |
| 4  | Kegiatan                                              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                         |
|    | Sub Kegiatan                                          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                |
|    | Sub Kegiatan                                          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  |
|    | Sub Kegiatan                                          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           |
|    | Sub Kegiatan                                          | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                          |
|    | Sub Kegiatan                                          | Penyediaan Bahan/Material                                                         |
|    | Sub Kegiatan                                          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              |

|     |              |                                                                                                                                               |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Kegiatan     | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                       |
|     | Sub Kegiatan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                  |
| 6   | Kegiatan     | <b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                        |
|     | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                |
|     | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                       |
|     | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                         |
| 7   | Kegiatan     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                  |
|     | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                               |
|     | Sub Kegiatan | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                  |
|     | Sub Kegiatan | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                            |
| II  | PROGRAM      | <b>PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                                |
| 1   | Kegiatan     | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                  |
|     | Sub Kegiatan | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal                                                                                                   |
|     | Sub Kegiatan | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |
| III | PROGRAM      | <b>PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                              |
| 1   | Kegiatan     | <b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b> |
|     | Sub Kegiatan | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik           |
|     | Sub Kegiatan | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal                                                                      |
|     | Sub Kegiatan | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan                      |
|     | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                                     |
| IV  | PROGRAM      | <b>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                               |
| 1   | Kegiatan     | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                 |
|     | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                            |
|     | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                             |

**Tabel 41 : Realisasi Anggaran Tahun 2021**

**LAPORAN DATA CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

| NO | URAIAN PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                  | INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                    | TARGET KINERJA | PAGU ANGGARAN ( DPA DPMPPTSP ) (Rp.) | REALISASI ANGGARAN (Rp.) | PERSENTASE CAPAIAN (%) | SISA /SELISIH DANA (SILPA) (Rp.) |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1  | 2                                          |                                                                  | 3                                                                                                | 4              | 5                                    | 6                        | 7                      | 8                                |
| I  | PROGRAM                                    | <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                      | Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah               | B              | 2,883,496,591                        | 2,848,541,985            | 98.79                  | 34,954,606                       |
| 1  | Kegiatan                                   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu                             | 100 Persen     | 11,000,000                           | 10,999,700               | 100.00                 | 300                              |
|    | Sub Kegiatan                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Renstra / Perubahan Renstra yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu          | 1 Dokumen      | 4,000,000                            | 4,000,000                | 100.00                 | 0                                |
|    | Sub Kegiatan                               | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen program dan kegiatan dan perencanaan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 3 Dokumen      | 5,000,000                            | 5,000,000                | 100.00                 | 0                                |
|    | Sub Kegiatan                               | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu                             | 2 Dokumen      | 2,000,000                            | 1,999,700                | 99.99                  | 300                              |
| 2  | Kegiatan                                   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    | Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu                           | 100 Persen     | 2,307,796,591                        | 2,273,739,285            | 98.52                  | 34,057,306                       |
|    | Sub Kegiatan                               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya                                                 | 25 orang       | 2,302,796,591                        | 2,268,739,285            | 98.52                  | 34,057,306                       |



|   |              |                                                                                   |                                                                                                  |     |            |             |             |        |         |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|-------------|--------|---------|
|   | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu         | 1   | Dokumen    | 3,000,000   | 3,000,000   | 100.00 | 0       |
|   | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan keuangan Bulanan/ Semesteran yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 6   | Dokumen    | 2,000,000   | 2,000,000   | 100.00 | 0       |
| 3 | Kegiatan     | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                  | <b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Kantor</b>                                         | 100 | Persentase | 34,322,100  | 34,274,000  | 99.86  | 48,100  |
| 1 | Sub Kegiatan | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                            | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya dan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu yang diadakan | 50  | Buah       | 24,998,100  | 24,950,000  | 99.81  | 48,100  |
| 2 | Sub Kegiatan | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                     | Jumlah Pelatihan/Workshop bagi Aparatur                                                          | 1   | Orang      | 9,324,000   | 9,324,000   | 100.00 | 0       |
| 4 | Kegiatan     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor</b>                                                    | 100 | Persentase | 215,106,550 | 214,955,550 | 99.93  | 151,000 |
|   | Sub Kegiatan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | Jumlah Jenis komponen listrik/penerangan yang disediakan                                         | 2   | Jenis      | 1,200,000   | 1,200,000   | 100.00 | 0       |
|   | Sub Kegiatan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  | Jumlah dan Jenis makanan yang disediakan                                                         | 4   | Jenis      | 26,180,000  | 26,150,000  | 99.89  | 30,000  |
|   | Sub Kegiatan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                         | Jumlah dan Jenis barang cetakan dan penggandaan                                                  | 5   | Jenis      | 30,001,600  | 29,997,600  | 99.99  | 4,000   |
|   | Sub Kegiatan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                          | Jumlah jenis bacaan yang disediakan                                                              | 2   | Jenis      | 7,080,000   | 7,080,000   | 100.00 | 0       |
|   | Sub Kegiatan | Penyediaan Bahan/Material                                                         | Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang di sediakan                                              | 34  | Jenis      | 40,095,950  | 40,094,250  | 100.00 | 1,700   |

|    |              |                                                                                                                 |                                                                                      |            |               |                    |                    |              |                |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|
|    | Sub Kegiatan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah SPPD hasil perjalanan dinas keluar daerah dan Dalam daerah                    | 47         | Dokumen       | 110,549,000        | 110,433,700        | 99.90        | 115,300        |
| 5  | Kegiatan     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor                                    | 100        | Persen        | 163,853,950        | 163,323,200        | 99.68        | 530,750        |
|    | Sub Kegiatan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah jenis Perlengkapan kantor yang diadakan                                       | 9          | jenis         | 163,853,950        | 163,323,200        | 99.68        | 530,750        |
| 6  | Kegiatan     | <b>Kegiatan :<br/>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b>Persentase Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor</b>                             | <b>100</b> | <b>Persen</b> | <b>45,579,000</b>  | <b>45,575,250</b>  | <b>99.99</b> | <b>3,750</b>   |
|    | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah surat yang terkirim                                                           | 3200       | Surat         | 7,875,000          | 7,872,000          | 99.96        | 3,000          |
|    | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Jenis rekening yang dibayarkan                                                | 1          | Jenis         | 6,204,000          | 6,203,250          | 99.99        | 750            |
|    | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah jenis dan jasa kebersihan                                                     | 3          | Orang         | 31,500,000         | 31,500,000         | 100.00       | 0              |
| 7  | Kegiatan     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor</b>                             | <b>100</b> | <b>Persen</b> | <b>105,838,400</b> | <b>105,675,000</b> | <b>99.85</b> | <b>163,400</b> |
|    | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 11         | Unit          | 40,775,000         | 40,775,000         | 100.00       | 0              |
|    | Sub Kegiatan | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Jenis gedung kantor yang dipelihara                                           | 7          | Jenis         | 52,063,400         | 51,900,000         | 99.69        | 163,400        |
|    | Sub Kegiatan | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara                                     | 3          | Jenis         | 13,000,000         | 13,000,000         | 100.00       | 0              |
| II | PROGRAM      | <b>PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                                                                                  | Jumlah Investor                                                                      | 450        | Investor      | 341,948,000        | 341,160,285        | 99.77        | 787,715        |

|     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                   |             |             |       |         |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|---------|
| 1   | Kegiatan     | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal                                                                                            | 6<br>D<br>o<br>k<br>u<br>m<br>e<br>n                                                              | 341,948,000 | 341,160,285 | 99.77 | 787,715 |
|     | Sub Kegiatan | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal                                                                                            | Jumlah dokumen Strategi promosi Penanaman Modal dan Jumlah dokumen evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota    | 2<br>D<br>o<br>k<br>u<br>m<br>e<br>n                                                              | 159,474,000 | 158,840,675 | 99.60 | 633,325 |
|     | Sub Kegiatan | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Frekuensi penyelenggaraan pameran penanaman modal yang diikuti dan Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota   | 4<br>D<br>o<br>k<br>u<br>m<br>e<br>n                                                              | 182,474,000 | 182,319,610 | 99.92 | 154,390 |
|     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                   |             |             |       |         |
| III | PROGRAM      | PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                              | Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                                                                             | Sangat Baik                                                                                       | 260,052,000 | 259,380,000 | 99.74 | 672,000 |
| 1   | Kegiatan     | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah dan Jenis Pelayanan Perizinan dan Non perizinan                                                                            | 84<br>j<br>e<br>n<br>i<br>s<br>i<br>z<br>i<br>n<br>d<br>a<br>n<br>n<br>o<br>n<br>i<br>z<br>i<br>n | 260,052,000 | 259,380,000 | 99.74 | 672,000 |
|     | Sub Kegiatan | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik    | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 1<br>D<br>o<br>k<br>u<br>m<br>e<br>n                                                              | 64,052,000  | 63,836,300  | 99.66 | 215,700 |
|     | Sub Kegiatan | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal                                                               | Jumlah pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan                                                                             | 1<br>D<br>o<br>k<br>u<br>m<br>e<br>n                                                              | 60,000,000  | 59,906,800  | 99.84 | 93,200  |
|     | Sub Kegiatan | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan               | Jumlah konsultasi pengelolaan aduan masyarakat                                                                                    | 1<br>D<br>o<br>k<br>u<br>m<br>e<br>n                                                              | 68,000,000  | 67,637,600  | 99.47 | 362,400 |

|    |              |                                                                                               |                                                                                                                      |                        |                |                      |                      |              |                   |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
|    | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                     | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                             | 1                      | Dokumen        | 68,000,000           | 67,999,300           | 100.00       | 700               |
| IV | PROGRAM      | <b>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                               | <b>Nilai realisasi Investasi daerah</b>                                                                              | <b>215.350.000.000</b> |                | <b>322,573,000</b>   | <b>297,314,500</b>   | <b>92.17</b> | <b>25,258,500</b> |
| 1  | Kegiatan     | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</b> | <b>2</b>               | <b>Dokumen</b> | <b>322,573,000</b>   | <b>297,314,500</b>   | <b>92.17</b> | <b>25,258,500</b> |
|    | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                            | jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                    | 4                      | Laporan        | 136,800,000          | 126,303,700          | 92.33        | 10,496,300        |
|    | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                             | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                     | 4                      | Laporan        | 185,773,000          | 171,010,800          | 92.05        | 14,762,200        |
|    |              |                                                                                               |                                                                                                                      |                        |                |                      |                      |              |                   |
|    |              | <b>TOTAL</b>                                                                                  |                                                                                                                      |                        |                | <b>3,808,069,591</b> | <b>3,746,396,770</b> | <b>98,38</b> | <b>61,672,821</b> |

Berdasarkan Realisasi Anggaran yang dicapai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dengan capaian persentase 98,38 %.

Sebagai gambaran realisasi anggaran setiap tahunnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Berikut ini kami tampilkan di tabel realisasi anggaran dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 42 : Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 s/d 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar**

| No. | Uraian                   | Tahun         |               |             |               |
|-----|--------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|     |                          | 2018          | 2019          | 2020        | 2021          |
| 1   | Pagu Anggaran (Rp.)      | 2.030.902.000 | 1.826.379.000 | 828.584.000 | 3,808,069,591 |
| 2   | Realisasi Anggaran (Rp.) | 2.028.062.925 | 1.824.265.725 | 828.039.802 | 3,746,396,770 |
| 3   | Persentase Capaian (%)   | 99,86         | 99,88         | 99,93       | 98.38         |
| 4   | Sisa Anggaran (Rp.)      | 2.839.075     | 2.113.275     | 544.198     | 61,672,821    |



## BAB IV

# PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok yang telah dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Dilihat dari ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban seperti tersebut diatas diperoleh dari laporan kinerja Bidang-bidang yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Program dan Kegiatan sesuai sasaran strategis.
3. Dalam pencapaian sasaran strategis dari masing-masing bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar sudah sebagian besar sudah mencapai target yang diharapkan.

### 4.2 Saran-Saran

Secara umum pelaksanaan berbagai kebijakan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurung waktu tahun 2021 terealisasi dengan baik dan juga masih perlu perbaikan target yang belum tercapai sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya untuk itu disarankan agar berjalan dengan baik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Pokok agar dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu mengingatkan kualitas SDM dan seluruh aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar masih perlu meningkatkan capaian kinerja yang dilaksanakan agar apa yang perlu direncanakan untuk mencapai sasaran yang telah optimal.

Demikian LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 ini disusun dan disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut pada tingkat pimpinan di daerah ini. Apabila diadakan penyusunan LAKIP ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, oleh karena itu sangat diharapkan sumbang dan saran dan berbagai pihak untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dimasa datang demi penyempurnaan LAKIP ini ditahun mendatang.



Polewali, 18 Februari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Polewali Mandar,

Drs. MUJAHIDIN, M. Si

Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP : 19660606 199801 1 021

**LAMPIRAN**  
**LAKIP DPMPPTSP**  
**TAHUN 2021**

# **LAMPIRAN I**

## **Perjanjian Kinerja Tahun 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali kode Pos 91315

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. MUJAHIDIN. M. Si**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Polewali Mandar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

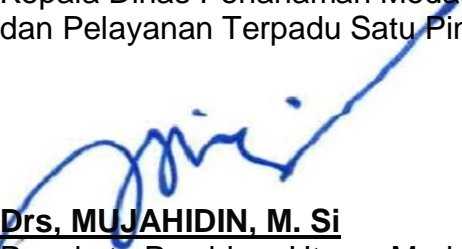
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 17 Mei 2021

Pihak Kedua,  
Bupati Polewali Mandar

  
**H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
**Drs. MUJAHIDIN, M. Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660606 199803 1 014



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

| No. | Sasaran Strategis                                           | Indikator Kinerja                                                           | Capaian 2020 | Target 2021 |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1.  | Meningkatnya Iklim Investasi Daerah                         | 1 Nilai Realisasi Investasi Daerah                                          | 99 Milyar    | 98 Milyar   |
| 2   | Meningkatnya kualitas Layanan perizinan dan Non Perizinan   | 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 85 Persen    | 86 Persen   |
| 3   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja             | 1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah                                           | A            | A           |
| 4   | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 Opini Pengelolaan Keuangan                                                | WTP          | WTP         |
| 5   | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran                 | 1 Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder                                    | Baik         | Baik        |

| No | Program                                          | Anggaran                | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1. | Program Promosi Penanaman Modal                  | Rp 341,948,000          | APBD       |
| 2. | Program Pelayanan Penanaman Modal                | Rp 260,052,000          | APBD       |
| 3  | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp 322,573,000          | APBD       |
| 4  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Rp 2,883,496,591        | APBD       |
|    | <b>Jumlah</b>                                    | <b>Rp 3,808,069,591</b> |            |

Polewali, 17 Mei 2021

**Pihak Kedua**

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

**Pihak Pertama**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. MUJAHIDIN, M. Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660606 199803 1 014

# **LAMPIRAN II**

## **Pengukuran Kinerja Tahun 2021**

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS PENANAMAN MODAL PTSP**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                           | INDIKATOR KINERJA SASARAN                               | TARGET    | CAPAIAN TARGET KINERJA | %   |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----|
| 1  | Meningkatnya Investasi Daerah                               | 1 Nilai realisasi investasi daerah PMD                  | 98 Milyar | 79 Milyar              | 81  |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 1 Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan | 86 Persen | 96 Persen              | 111 |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja             | 1 Predikat SAKIP perangkat Daerah                       | Baik      | Baik                   | 100 |
| 4  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 Opini pengelolaan keuangan perangkat daerah           | WTF       | WTF                    | 100 |
| 5  | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran                 | 1 Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder                | Baik      | Baik                   | 100 |

Polewali, 04 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

  
**Drs. MUJAHIDIN, M. Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660606 199801 1 014

# **LAMPIRAN III**

## **Realisasi Anggaran Tahun 2021**

### Lampiran 3 : Realisasi Anggaran Tahun 2021

**LAPORAN DATA CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

| NO | URAIAN PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                         | INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                    | TARGET KINERJA | PAGU ANGGARAN ( DPA DPMPTSP ) (Rp.) | REALISASI ANGGARAN (Rp.) | PERSENTASE CAPAIAN (%) | SISA /SELISIH DANA (SILPA) (Rp.) |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1  | 2                                          |                                                                         | 3                                                                                                | 4              | 5                                   | 6                        | 7                      | 8                                |
| I  | PROGRAM                                    | <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                             | <b>Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah</b>        | <b>B</b>       | <b>2,883,496,591</b>                | <b>2,848,541,985</b>     | <b>98.79</b>           | <b>34,954,606</b>                |
| 1  | Kegiatan                                   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu</b>                      | <b>100</b>     | <b>11,000,000</b>                   | <b>10,999,700</b>        | <b>100.00</b>          | <b>300</b>                       |
|    | Sub Kegiatan                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Renstra / Perubahan Renstra yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu          | 1              | 4,000,000                           | 4,000,000                | 100.00                 | 0                                |
|    | Sub Kegiatan                               | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | Jumlah Dokumen program dan kegiatan dan perencanaan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 3              | 5,000,000                           | 5,000,000                | 100.00                 | 0                                |
|    | Sub Kegiatan                               | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu                             | 2              | 2,000,000                           | 1,999,700                | 99.99                  | 300                              |
| 2  | Kegiatan                                   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu</b>                    | <b>100</b>     | <b>2,307,796,591</b>                | <b>2,273,739,285</b>     | <b>98.52</b>           | <b>34,057,306</b>                |
|    | Sub Kegiatan                               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya                                                 | 25             | 2,302,796,591                       | 2,268,739,285            | 98.52                  | 34,057,306                       |



|          |                     |                                                                                   |                                                                                                  |            |               |                    |                    |              |                |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|
|          | <b>Sub Kegiatan</b> | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu         | 1          | Dokumen       | 3,000,000          | 3,000,000          | 100.00       | 0              |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan keuangan Bulanan/ Semesteran yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 6          | Dokumen       | 2,000,000          | 2,000,000          | 100.00       | 0              |
| <b>3</b> | <b>Kegiatan</b>     | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                  | <b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Kantor</b>                                         | <b>100</b> | <b>Persen</b> | <b>34,322,100</b>  | <b>34,274,000</b>  | <b>99.86</b> | <b>48,100</b>  |
| 1        | <b>Sub Kegiatan</b> | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                            | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya dan Pakaian Khusus Hari Hari Tertenta yang diadakan | 50         | Buah          | 24,998,100         | 24,950,000         | 99.81        | 48,100         |
| 2        | <b>Sub Kegiatan</b> | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                     | Jumlah Pelatihan/Workshop bagi Aparatur                                                          | 1          | Orang         | 9,324,000          | 9,324,000          | 100.00       | 0              |
| <b>4</b> | <b>Kegiatan</b>     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor</b>                                                    | <b>100</b> | <b>Persen</b> | <b>215,106,550</b> | <b>214,955,550</b> | <b>99.93</b> | <b>151,000</b> |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | Jumlah Jenis komponen listrik/penerangan yang disediakan                                         | 2          | Jenis         | 1,200,000          | 1,200,000          | 100.00       | 0              |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  | Jumlah dan Jenis makanan yang disediakan                                                         | 4          | Jenis         | 26,180,000         | 26,150,000         | 99.89        | 30,000         |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           | Jumlah dan Jenis barang cetakan dan penggandaan                                                  | 5          | Jenis         | 30,001,600         | 29,997,600         | 99.99        | 4,000          |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                          | Jumlah jenis bacaan yang disediakan                                                              | 2          | Jenis         | 7,080,000          | 7,080,000          | 100.00       | 0              |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> | Penyediaan Bahan/Material                                                         | Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang di sediakan                                              | 34         | Jenis         | 40,095,950         | 40,094,250         | 100.00       | 1,700          |

|    |                     |                                                                                                                 |                                                                                      |      |            |             |             |        |         |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|-------------|--------|---------|
|    | <b>Sub Kegiatan</b> | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah SPPD hasil perjalanan dinas keluar daerah dan Dalam daerah                    | 47   | Dokumen    | 110,549,000 | 110,433,700 | 99.90  | 115,300 |
| 5  | <b>Kegiatan</b>     | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>Persentase Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor</b>                             | 100  | Persentase | 163,853,950 | 163,323,200 | 99.68  | 530,750 |
|    | <b>Sub Kegiatan</b> | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah jenis Perlengkapan kantor yang diadakan                                       | 9    | jenis      | 163,853,950 | 163,323,200 | 99.68  | 530,750 |
| 6  | <b>Kegiatan</b>     | <b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                          | <b>Persentase Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor</b>                             | 100  | Persentase | 45,579,000  | 45,575,250  | 99.99  | 3,750   |
|    | <b>Sub Kegiatan</b> | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah surat yang terkirim                                                           | 3200 | Surat      | 7,875,000   | 7,872,000   | 99.96  | 3,000   |
|    | <b>Sub Kegiatan</b> | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Jenis rekening yang dibayarkan                                                | 1    | Jenis      | 6,204,000   | 6,203,250   | 99.99  | 750     |
|    | <b>Sub Kegiatan</b> | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah jenis dan jasa kebersihan                                                     | 3    | Orang      | 31,500,000  | 31,500,000  | 100.00 | 0       |
| 7  | <b>Kegiatan</b>     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor</b>                             | 100  | Persentase | 105,838,400 | 105,675,000 | 99.85  | 163,400 |
|    | <b>Sub Kegiatan</b> | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 11   | Unit       | 40,775,000  | 40,775,000  | 100.00 | 0       |
|    | <b>Sub Kegiatan</b> | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Jenis gedung kantor yang dipelihara                                           | 7    | Jenis      | 52,063,400  | 51,900,000  | 99.69  | 163,400 |
|    | <b>Sub Kegiatan</b> | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara                                     | 3    | Jenis      | 13,000,000  | 13,000,000  | 100.00 | 0       |
| II | <b>PROGRAM</b>      | <b>PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                                                                                  | <b>Jumlah Investor</b>                                                               | 450  | Investor   | 341,948,000 | 341,160,285 | 99.77  | 787,715 |

|     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                   |             |             |       |         |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|---------|
| 1   | Kegiatan     | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal                                                                                            | 6<br>D<br>o<br>k<br>u<br>m<br>e<br>n                                                              | 341,948,000 | 341,160,285 | 99.77 | 787,715 |
|     | Sub Kegiatan | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal                                                                                            | Jumlah dokumen Strategi promosi Penanaman Modal dan Jumlah dokumen evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota    | 2<br>D<br>o<br>k<br>u<br>m<br>e<br>n                                                              | 159,474,000 | 158,840,675 | 99.60 | 633,325 |
|     | Sub Kegiatan | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Frekuensi penyelenggaraan pameran penanaman modal yang diikuti dan Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota   | 4<br>D<br>o<br>k<br>u<br>m<br>e<br>n                                                              | 182,474,000 | 182,319,610 | 99.92 | 154,390 |
|     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                   |             |             |       |         |
| III | PROGRAM      | PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                              | Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                                                                             | Sangat Baik                                                                                       | 260,052,000 | 259,380,000 | 99.74 | 672,000 |
| 1   | Kegiatan     | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah dan Jenis Pelayanan Perizinan dan Non perizinan                                                                            | 84<br>j<br>e<br>n<br>i<br>s<br>i<br>z<br>i<br>n<br>d<br>a<br>n<br>n<br>o<br>n<br>i<br>z<br>i<br>n | 260,052,000 | 259,380,000 | 99.74 | 672,000 |
|     | Sub Kegiatan | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik    | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 1<br>D<br>o<br>k<br>u<br>m<br>e<br>n                                                              | 64,052,000  | 63,836,300  | 99.66 | 215,700 |
|     | Sub Kegiatan | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal                                                               | Jumlah pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan                                                                             | 1<br>D<br>o<br>k<br>u<br>m<br>e<br>n                                                              | 60,000,000  | 59,906,800  | 99.84 | 93,200  |
|     | Sub Kegiatan | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan               | Jumlah konsultasi pengelolaan aduan masyarakat                                                                                    | 1<br>D<br>o<br>k<br>u<br>m<br>e<br>n                                                              | 68,000,000  | 67,637,600  | 99.47 | 362,400 |

|           |                     |                                                                                               |                                                                                                                      |                        |                      |                      |              |                   |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
|           | <b>Sub Kegiatan</b> | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                     | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                             | 1<br>Dokumen           | 68,000,000           | 67,999,300           | 100.00       | 700               |
| <b>IV</b> | <b>PROGRAM</b>      | <b>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                               | <b>Nilai realisasi Investasi daerah</b>                                                                              | <b>215.350.000.000</b> | <b>322,573,000</b>   | <b>297,314,500</b>   | <b>92.17</b> | <b>25,258,500</b> |
| <b>1</b>  | <b>Kegiatan</b>     | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</b> | <b>2</b><br>Dokumen    | <b>322,573,000</b>   | <b>297,314,500</b>   | <b>92.17</b> | <b>25,258,500</b> |
|           | <b>Sub Kegiatan</b> | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                            | jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                    | 4<br>Laporan           | 136,800,000          | 126,303,700          | 92.33        | 10,496,300        |
|           | <b>Sub Kegiatan</b> | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                             | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                     | 4<br>Laporan           | 185,773,000          | 171,010,800          | 92.05        | 14,762,200        |
|           |                     |                                                                                               |                                                                                                                      |                        |                      |                      |              |                   |
|           |                     | <b>TOTAL</b>                                                                                  |                                                                                                                      |                        | <b>3,808,069,591</b> | <b>3,746,396,770</b> | <b>98,38</b> | <b>61,672,821</b> |

Polewali, 3 Januari 2022

Kepala Dinas PMPTSP,

  
**Drs. MUJAHIDIN, M. Si**

Pangkat : Pembuna Utama Muda

NIP : 19660606 199803 1 014